ANALISIS KEBIJAKAN KONTRA TERORISME TURKI TERHADAP PEMBERONTAKAN PKK (2015-2020) DITINJAU DARI *COUNTERINSURGENCY THEORY*

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

MUHAMMAD JUANDA HERIONO

20323331

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

ANALISIS KEBIJAKAN KONTRA TERORISME TURKI TERHADAP PEMBERONTAKAN PKK (2015-2020) DITINJAU DARI *COUNTERINSURGENCY THEORY*

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

MUHAMMAD JUANDA HERIONO

20323331

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN KONTRATERORISME TURKI TERHADAP PEMBERONTAKAN PKK (2015-2020) DITINJAU DARI *COUNTERINSURGENCY THEORY*

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
24 Juli 2024

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
2. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
3. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik

Yogyakarta, 24-Juli-2024



Muhammad Juanda Heriono

DAFTAR ISI

SAMPUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang ***1***
1.2 Rumusan Masalah ***4***
1.3 Tujuan Penelitian ***5***
1.4 Cakupan Penelitian ***5***
1.5 Tinjauan Pustaka ***5***
1.6 Kerangka Pemikiran ***9***
1.7 Argumen Sementara ***12***
1.8 Metode Penelitian ***13***
1.8.1 Jenis Penelitian *13*
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian *13*
1.8.3 Metode Pengumpulan Data *13*
1.8.4 Proses Penelitian *14*
1.9 Sistematika Pembahasan ***14***
BAB II DINAMIKA HUBUNGAN POLITIK ANTARA PKK, PEMERINTAH TURKI, DAN PARTAI-PARTAI POLITIK TURKI **16**
2.1 Dinamika Hubungan Antara PKK Dengan Pemerintah Turki ***16***
2.1.1 Motif Pemberontakan PKK Terhadap Pemerintah Turki *17*
2.1.2 Upaya Perdamaian PKK dengan Pemerintah Turki *18*
2.1.3 Perjanjian Dolmabahce *20*
2.1.4 Berakhirnya Gencatan Senjata pada 2015 ..... *22*
2.2 Dinamika Politik Antara PKK Dengan Partai-Partai Politik Turki .. ***25***

2.2.1 Dinamika Hubungan PKK dan AKP 25
2.2.2 Dinamika Hubungan PKK dan MHP 26
2.2.3 Dinamika Hubungan PKK dan CHP 27
2.2.4 Dinamika Hubungan PKK dan HDP 29
2.3 Kebijakan Hukum dalam Kontraterorisme Turki *30*
BAB III ANALISIS PENERAPAN STRATEGI *COUNTER-INSURGENCY* OLEH TURKI TERHADAP PKK 32
3.1 Langkah Pertama: Penghancuran atau Pengusiran Pasukan Pemberontak..... *33*
3.2 Langkah Kedua: Penerjunan Unit Statis *39*
3.3 Langkah Ketiga: Kontak dan Kendali Atas Populasi *43*
3.4 Langkah Keempat: Penghancuran Organisasi Politik Pemberontak *46*
3.5 Langkah Kelima: Pemilu Lokal *48*
3.6 Langkah Keenam: Menguji Pemimpin Lokal *50*
3.7 Langkah Ketujuh: Membentuk Sebuah Partai *50*
3.8 Langkah Kedelapan: Memenangkan atau Menekan Sisa-Sisa Pemberontak..... *52*
BAB IV PENUTUP 54
4.1 Kesimpulan..... *54*
4.2 Rekomendasi *56*
DAFTAR PUSTAKA..... 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penyerangan Militer Turki Terhadap PKK 36
Gambar 2. Pembersihan Ranjau dan Barikade PKK 42

DAFTAR SINGKATAN

AKP : *Adalet ve Kalkınma Partisi*

CHP : *Cumhuriyet Halk Partisi*

COIN : *Counter-Insurgency Theory*

HDP : *Halklarin Demokratik Partisi*

ISIS : *Islamic State in Iraq and Syam*

KCK : *Koma Civakên Kurdistanê*

MHP : *Milliyetçi Hareket Partisi*

PKK : *Partiya Karkerên Kurdistan*

TSK : *Türk Silahlı Kuvvetleri*

ABSTRAK

Konflik antara pemerintah Turki dan PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan)* telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan berbagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan, mulai dari negosiasi perdamaian hingga operasi militer. PKK adalah kelompok teroris di wilayah Turki yang anggotanya terdiri dari etnis Kurdi dan berbasis di wilayah tenggara Turki. Sejak awal, motif kebangkitan mereka adalah akibat diskriminasi dan penindasan oleh pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi di negara tersebut. Tujuan utama PKK adalah menuntut otonomi wilayah. Sejak berakhirnya gencatan senjata pada tahun 2015, pemerintah Turki telah mengintensifkan strategi kontra terorisme untuk melawan PKK. Strategi ini mencakup operasi militer skala besar di wilayah tenggara Turki, yang mayoritas penduduknya beretnis Kurdi. Penulis menggunakan *Counter-Insurgency Theory* (COIN) yang disampaikan oleh David Galula sebagai kerangka pemikiran dalam menganalisis konflik tersebut. Pemerintah Turki mengimplementasikan strategi kontra terorisme yang intensif dan sesuai dengan variabel-variabel dalam teori *Counter-Insurgency*. Operasi ini termasuk penyerangan udara dan darat, serta penempatan unit statis untuk mengendalikan wilayah yang telah dikuasai. Selain itu, Turki juga melakukan tindakan politik, seperti menangkap para politikus yang diduga mendukung PKK. Strategi ini menunjukkan bagaimana teori *Counter-Insurgency* dapat diterapkan dalam konteks nyata untuk menghadapi kelompok pemberontak.

Kata Kunci: Pemerintah Turki, PKK, Strategi Kontra Terorisme, COIN

The conflict between the Turkish government and the PKK (Partiya Karkeren Kurdistan) has been ongoing for several decades, with various resolution efforts ranging from peace negotiations to military operations. The PKK is a terrorist group in Turkey, composed of ethnic Kurds and based in southeastern Turkey. From the beginning, their resurgence was a result of discrimination and oppression by the Turkish government against the Kurds in the country. The main goal of the PKK is to demand regional autonomy. Since the end of the ceasefire in 2015, the Turkish government has intensified its counterterrorism strategy to fight the PKK. This strategy includes large-scale military operations in southeastern Turkey, where the majority of the population is Kurdish. The author uses David Galula's Counter-Insurgency Theory (COIN) as a framework to analyze this conflict. The Turkish government has implemented an intensive counterterrorism strategy that aligns with the variables in the Counter-Insurgency theory. These operations include both air and ground assaults, as well as the deployment of static units to control captured territories. Additionally, Turkey has taken political actions, such as arresting politicians suspected of supporting the PKK. This strategy demonstrates how Counter-Insurgency theory can be applied in a real-world context to confront insurgent groups

.***Keywords:*** *Turkish Government, PKK, Counterterrorism Strategy, COIN*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurdi, sebuah istilah yang mengacu pada kelompok etnis yang menetap di Timur Tengah, menyiratkan kerumitan identitas mereka yang dibentuk oleh lapisan-lapisan bahasa, kekayaan budaya, dan warisan sejarah yang melimpah. Kurdish adalah istilah umum untuk sekelompok dialek Iran Barat yang sangat terkait, yang diucapkan di wilayah yang luas dan berdekatan yang membentang dari Turki ke Irak, Iran, dan Armenia, dengan kelompok-kelompok kecil di negara-negara lain, istilah umum ini juga mencerminkan persatuan linguistik dan etnis yang dirasakan oleh para penutur meskipun terdapat perbedaan linguistik yang signifikan (McCarus 2009). Bangsa Kurdi memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah banyaknya dengan bangsa-bangsa di Timur Tengah lainnya.

Kurdistan yang berarti tanah orang Kurd, menjadi wilayah yang ditempati oleh bangsa Kurdi, pengakuan resmi Wilayah Kurdistan sebagai entitas federal di Irak pada tahun 2005 merupakan langkah progresif yang mengakui hak otonomi bagi masyarakat Kurdi. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya dan etnis di Irak, sambil mengakui peran penting otoritas lokal dalam mengelola wilayah mereka sendiri. Daerah yang berada di bawah kendali otoritas Kurdi sejak saat itu dikenal sebagai Wilayah Kurdistan (KR), yang merupakan sebuah wilayah federal yang dideklarasikan sendiri di Irak hingga tahun 2005 ketika

konstitusi Irak secara resmi mengakui wilayah Kurdistan, beserta otoritas yang ada, sebagai wilayah federal di Irak (Kirmanj 2013).

Bangsa Kurdi sejak dulu tinggal di wilayah kekuasaan kekhalifahan Ottoman, hingga pada akhirnya Ottoman kalah pada perang dunia 1. Setelah Ottoman dikalahkan, pihak aliansi membentuk sebuah traktat yang bernama *Treaty of Sevres* yang isinya bertujuan untuk mengakhiri peperangan antara Ottoman dengan Aliansi dan mengatur pembagian wilayah. Pakta tersebut juga menyediakan untuk Armenia yang independen, untuk Kurdistan yang otonom, dan untuk kehadiran Yunani di Thrace timur dan di pantai barat Anatolia, serta kontrol Yunani atas kepulauan Aegea yang mengendalikan Dardanelles (Britannica, 2024). Meskipun begitu, karena ketidakstabilan politik kawasan dan bangkitnya rezim nasionalis yang dipimpin Mustafa Kemal, kemerdekaan negara Kurdistan dibatalkan, dan bangsa Kurdi menjadi salah satu bangsa terbesar yang tidak memiliki negara di dunia (Radpey 2022). Bangsa Kurdi yang menggantungkan harapan pada traktat ini pun sirna karena hal-hal yang terjadi di luar kuasanya sebagai bangsa yang memiliki kekuatan politik lebih lemah daripada Turki.

Treaty of Lausanne menjadi titik sejarah yang sangat menyedihkan bagi bangsa Kurdi, dengan menggantikan Traktat *Sèvres* tahun 1920, yang telah menjanjikan pembentukan negara Kurdi di Timur Tengah, Traktat Lausanne merupakan pukulan berat bagi aspirasi bangsa Kurdi untuk menentukan nasib sendiri (Saeed 2023). karena traktat ini resmi menghapuskan kesempatan bagi Kurdish untuk bisa mendapatkan kemerdekaan, yang menjadi awal mula penindasan dan diskriminasi pada Kurdish oleh

negara-negara yang mereka tinggali, namun ini juga menjadi awal mula pergerakan nasionalisme Kurdish untuk memperjuangkan haknya.

Pergerakan awal bangsa Kurdi yang terorganisir di Turki dimulai saat dibentuknya PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*) oleh Abdullah Ocalan, sejak didirikan pada tahun 1978 hingga kini, berbagai aksi-aksi teror telah dilakukan PKK sehingga otoritas Turki memandang PKK sebagai organisasi terorisme paling berbahaya di teritorinya (Pradnyana and Rofii 2020). Pada awalnya kelompok ini hanya melakukan aktivitas politik saja dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Kurdi, kemudian masa awal perjuangan bersenjata atau pemberontakan PKK terhadap pemerintah Turki dimulai pada tahun 1982 setelah kudeta militer Turki pada 1980. Ancaman atau tindakan terorisme yang dilakukan oleh PKK terhadap Turki mencakup strategi seperti penggunaan kekerasan bersenjata, serangan bom, dan penyergapan. Konsekuensi dari tindakan terorisme PKK ini sangat mempengaruhi keamanan nasional Turki. Tidak hanya itu, dampaknya juga meluas ke kondisi ekonomi dan sosial Turki.

Sejak awal pemberontakannya pada 1980-an, kedua pihak telah mengalami kerugian yang sangat besar, konflik antara pemerintah Turki melawan kelompok Partai Pekerja Kurdi (PKK) sudah menewaskan sedikitnya 40.000 orang (Primus 2013). Pada tahun 1998, setelah bertahun-tahun menjadi buronan dan memimpin gerakan perlawanan Kurdi dari persembunyiannya, Öcalan akhirnya tertangkap. PKK beroperasi di Suriah hingga tahun 1998 ketika Ocalan harus melarikan diri di tengah meningkatnya tekanan Turki, dia ditangkap oleh pasukan khusus Turki beberapa bulan kemudian di Kenya dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Turki pada tahun 1999 (Mustaqim 2023). Momen penangkapan Ocalan menjadi titik awal dinamika perjanjian

gencatan senjata antara Turki dan PKK, karena pada masa inilah peluang untuk mengadakan negosiasi perdamaian menjadi lebih terbuka.

Sejak penangkapan Ocalan pada 1999, PKK telah beberapa kali menyatakan gencatan senjata namun seringkali itu tidak berlangsung lama, dan yang terakhir pada 2013 ketika Turki menyambut dengan baik tawaran gencatan senjata dengan PKK, pemerintah Turki telah mengupayakan gencatan senjata permanen dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, dimulai dengan pelucutan senjata militan PKK, media Turki melaporkan pada 23 Februari menjelang kunjungan tiga Partai Perdamaian dan Demokrasi (BDP) wakil pemimpin PKK Abdullah Öcalan yang dipenjara (Hurriyet 2013). Namun hal yang sama terus kembali berulang, gencatan senjata ini pun berakhir pada 2015 ketika PKK melancarkan beberapa serangan pada militer turki, dengan adanya serangan yang dilakukan oleh PKK, hal ini mengakibatkan kerusakan pada kesepakatan damai yang sudah dicapai oleh kedua belah pihak dan mengakhiri gencatan senjata yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun (Andika 2023). Semenjak saat itu, Turki melancarkan strategi kontra terorisme dalam tujuan untuk mengakhiri pemberontakan PKK yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka penulis akan menentukan rumusan masalah yang membahas mengenai: “Bagaimana upaya pemerintah Turki dalam melawan pemberontakan PKK dari 2015 hingga 2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berbagai macam langkah kontra terorisme apa saja yang diambil Turki untuk melawan PKK dari 2015 hingga 2020.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada tindakan kontra-terorisme yang diambil oleh pemerintah Turki dalam melawan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dari tahun 2015 hingga 2020. Analisis akan dilakukan secara mendalam dan terstruktur untuk mengevaluasi efektivitas upaya dan kebijakan tersebut dalam meredam pemberontakan PKK, serta membandingkannya dengan upaya-upaya sebelumnya yang telah diterapkan oleh pemerintah Turki. Cakupan penelitian ini dimulai dari tahun 2015, ketika terjadi tragedi yang mengakhiri gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 tahun antara Turki dan PKK, dan berakhir pada tahun 2020, tahun dimana wabah Covid-19 mengganggu strategi kontraterorisme dan mengalihkan perhatian serta sumber daya negara dari strategi kontraterorisme menuju penanganan krisis akibat wabah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Konflik yang terjadi karena terorisme PKK sebagai kelompok yang menuntut kemerdekaan bangsa Kurdi di Turki, telah menjadi pembahasan yang menarik untuk diteliti, penelitian mengenai terorisme tersebut telah ada sejak masa awal didirikannya PKK di Turki oleh Abdullah Ocalan. Maka dari itu Penulis akan menyuguhkan

beberapa penelitian yang akan dijadikan bukti perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama di dalam jurnal yang berjudul "*Turkey's Military Victory over the PKK and Its Failure to End the PKK Insurgency*" yang ditulis oleh Ozlem Kayhan Pusane pada 2015. Dalam penelitiannya, lebih berfokus mencari jawaban mengapa Turki tidak mampu memberantas sepenuhnya PKK pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Dan salah satu alasannya adalah meskipun PKK tidak pernah hanya merupakan sekelompok pria bersenjata, melainkan gerakan pemberontakan yang sudah berkembang dengan baik sejak awal, pemerintah Turki gagal memahami sifat sebenarnya dari pemberontakan PKK dan berpikir bahwa penggunaan kekuatan militer akan cukup untuk menjatuhkan gerakan tersebut (Pusane 2015). Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan judul yang Penulis tulis adalah, penelitian ini akan lebih berfokus pada alasan mengapa upaya perlawanan Turki terhadap PKK terbilang efektif pada periode 2015-2016.

Kedua yaitu Jurnal yang berjudul "*An Assessment of Police Legitimacy and Public Cooperation on Counterterrorism in Turkey*" yang ditulis oleh Bulent Uluturk pada 2017. Penelitian ini fokus menilai seberapa tinggi tingkat efektivitas upaya kontra terorisme yang dilakukan pemerintah Turki menggunakan teori *instrumental and normative*, dan tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi sikap masyarakat terhadap legitimasi kepolisian dan kerjasama dalam kontra-terorisme, serta untuk menguji faktor-faktor yang berkaitan dengan kemauan masyarakat untuk bekerja sama dengan polisi dengan mengungkapkan pengaruh dari pencegahan dan legitimasi

terhadap kerjasama (Ulutürk 2017). Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan lebih membahas berbagai macam kebijakan dan upaya pemerintah Turki secara lebih luas serta efektifitasnya dalam melawan terorisme PKK secara khusus.

Ketiga, yaitu sebuah buku yang berjudul "*Zones of Rebellion: Kurdish Insurgent and the Turkish State*" yang ditulis oleh Aysegul Aydin dan Cem Emrence pada 2015. Buku ini menjelaskan alasan mengapa pertempuran bisa terjadi dan juga dampaknya, Aydin dan Emrence ingin memberitahu bahwa buku ini adalah medan intelektual baru yang membuat buku ini menjadi studi kasus tentang Turki dan studi umum tentang proses konflik pada saat yang sama (Aydin and Emrence 2015) . Meskipun buku telah menjelaskan begitu banyak pemberontakan PKK dan upaya kontra terorisme oleh Turki, namun buku ini hanya memberikan fakta hingga 2015 di saat buku ini diterbitkan, sedangkan penelitian ini akan membahas kebaruan dari konflik ini dari 2015 hingga 2020 dan lebih berfokus untuk menjelaskan upaya kontra terorisme dari pemerintah Turki secara khusus.

Keempat, yaitu buku yang berjudul "*Insurgency and Counter-Insurgency in Turkey: The New PKK*" yang ditulis oleh Spyridon Plakoudas pada 2018. Buku ini menjelaskan secara akurat bagaimana pemberontakan PKK mulai dari skala terkecil hingga yang terbesar dan respon kontraterorisme dari Turki. Perbedaan antara buku tersebut dengan penelitian ini adalah buku ini kurang menjelaskan perbandingan tingkat efektifitas upaya kontra terorisme Turki dari tahun ke tahun, tidak seperti penelitian ini yang bertujuan untuk mengkomparasikan perbedaan upaya kontra terorisme Turki dari 2015 hingga 2020 dan mencoba menganalisisnya dengan pendekatan komprehensif. Meskipun begitu, Penulis tetap akan menggunakan buku ini

sebagai sumber literatur utama dalam melihat berbagai pertempuran kedua pihak, ditambah lagi buku ini akan menggunakan wawasan dari disiplin Hubungan Internasional dan Strategi untuk memberikan analisis yang terkini dan kritis tentang konflik Turki vs PKK (Plakoudas 2018).

Dan terakhir yang kelima, sebuah jurnal yang berjudul "*Ankara VS The PKK: Old War, New Strategies*" yang ditulis oleh Metin Gurcan pada 2016. Dalam jurnal ini Gurcan berpendapat bahwa konflik antara Turki dan PKK dinilai gagal dan tidak akan pernah bisa selesai jika Turki hanya berfokus pada pembasmian PKK dengan langkah militer saja, melainkan perlunya dominasi dalam medan manusia, seperti yang disarankan dalam artikel ini, dominasi di medan fisik tidak lagi relevan, dominasi atas hati dan pikiran penduduk lokal yang tinggal di zona konflik akan menjadi faktor utama yang secara langsung menentukan hasil (Gurcan 2016). Pendapat Gurcan dinilai berbanding terbalik dengan argumen sementara Penulis yang beranggapan bahwa langkah kontra terorisme Turki tentu dapat berdampak secara signifikan jika konsistensi Turki terjaga.

Dari sekian penelitian yang Penulis tinjau, belum ada penelitian yang membahas secara mendetail dan komprehensif mengenai apa saja langkah dan kebijakan yang diambil Turki untuk melawan aktivitas terorisme, khususnya strategi kontraterorisme Turki terhadap PKK. Dan juga belum ada penelitian yang membahas bagaimana upaya tersebut bisa meningkatkan efektifitas penurunan tingkat terorisme di Turki dari 2015 hingga 2020. Meskipun demikian, penelitian-penelitian di atas akan tetap membantu penulis untuk mencapai tujuan penelitian ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori *Counterinsurgency* oleh David Gulala dalam bukunya yang berjudul "*Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*" akan menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan terkait isu yang dikaji. Teori *Counterinsurgency* (COIN) oleh David Galula merupakan panduan strategis dalam menangani pemberontakan. Meskipun terdapat perbedaan antara teori ini dan isu terorisme PKK di Turki, di mana teori ini berfokus pada upaya perlawanan pemerintah terhadap kelompok pemberontak sementara PKK dianggap sebagai kelompok teroris, namun teori ini masih dapat menjelaskan strategi kontra terorisme Turki terhadap PKK. Hal ini karena berdasarkan observasi peneliti, meskipun PKK dianggap sebagai kelompok teroris, mereka melakukan aktivitas serupa dengan kelompok pemberontak. Sebagai contoh, motif yang dimiliki PKK sebagian didorong oleh ideologi politik, dan mereka tidak hanya menargetkan warga sipil tetapi juga infrastruktur pemerintah. Selain itu, skala pergerakan PKK mencakup skala yang lebih besar dan terorganisir, mirip dengan gerakan pemberontakan. Kemudian teori ini dinilai dapat menjelaskan secara rinci dan relevan oleh penulis untuk mendefinisikan pemberontakan seperti apa yang dilakukan oleh PKK dan langkah yang efektif bagi Turki untuk melawan pemberontakan tersebut.

Dalam teorinya, Gulala menjelaskan 8 variabel kunci yang terdiri atas;

1. *The First Step: Destruction or Expulsion of the Insurgent Forces.* Tahap awal ini dirancang untuk memberikan serangan yang kuat dan masif terhadap kelompok teroris dengan tujuan melemahkan kekuatan mereka secara signifikan. Selain itu,

langkah ini dianggap sebagai awal yang strategis untuk mempersiapkan langkah-langkah berikutnya dalam menangani kelompok teroris dengan lebih efektif.

2. *The Second Step: Deployment of the Static Unit.* Setelah tahap awal dilakukan, pemerintah perlu mengirimkan dan menempatkan unit-unit statis di wilayah yang sebelumnya diserang agar serangan berikutnya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran dan kontrol pemerintah di area yang terpengaruh serta memperkuat pertahanan terhadap serangan yang mungkin terjadi di masa depan.
3. *The Third Step: Contact with and Control of the Population.* Langkah ketiga melibatkan pengendalian populasi atau masyarakat di sekitar wilayah yang diserang. Ini merupakan tahap yang paling kritis dalam proses tersebut karena bersifat transisional, mengalihkan fokus dari operasi militer menjadi operasi politik, sambil menanggung beban berat dari kedua aspek tersebut.
4. *The Fourth Step: Destruction of the Insurgent Political Organization.* Langkah keempat melibatkan pembubaran dan penangkapan organisasi politik dan nonpolitik yang terkait dengan kelompok teroris di wilayah yang diserang, dengan tujuan agar mereka tidak dapat membangun kembali kekuatan mereka. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan basis dukungan dan infrastruktur yang mungkin digunakan oleh kelompok-kelompok teroris untuk merencanakan dan melancarkan serangan di masa depan.
5. *The Fifth Step: Local Elections.* Langkah kelima adalah mengadakan pemilihan umum lokal yang bertujuan untuk menempatkan individu yang dipercayai oleh pemerintah untuk mengelola wilayah yang telah diserang dengan pendekatan

politis. Melalui proses pemilihan ini, diharapkan akan terpilih pemimpin lokal yang memiliki komitmen terhadap keamanan, stabilitas, dan rekonsiliasi dalam wilayah yang terdampak konflik.

6. *The Sixth Step: Testing The Local Leaders*. Langkah keenam adalah melakukan evaluasi terhadap respons masyarakat terhadap pemimpin wilayah yang telah terpilih, dengan mempertimbangkan apakah pemimpin tersebut berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat dan memberikan rasa keamanan bagi mereka.
7. *The Seventh Step: Organizing a Party.* Langkah ketujuh adalah membentuk sebuah partai politik yang dapat memperkuat pengaruh negara di dalam wilayah yang telah diserang. Dengan kehadiran partai politik yang mendukung pemerintah, masyarakat yang menentang kelompok teroris akan diberikan wadah untuk bersuara dan berpartisipasi dalam proses politik.
8. *The Eighth Step: Winning Over or Suppressing the Last Guerillas*. Langkah terakhir yaitu melakukan penekanan terhadap anggota-anggota kelompok teroris yang tersisa hingga ke akarnya, dengan tujuan agar tidak lagi muncul bibit-bibit pemberontakan baru. Tindakan ini mencakup upaya penegakan hukum yang ketat dan penindakan terhadap individu-individu yang terlibat dalam aktivitas teroris. Selain itu, langkah ini juga melibatkan upaya pencegahan untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme dan rekrutmen teroris.

Teori awal yang diusulkan oleh Gulala merinci serangkaian langkah kontra terorisme yang kemudian diadopsi oleh beberapa negara dalam menangani pemberontakan di dalam dan di luar wilayah mereka. Teori tersebut menekankan

perlunya strategi kontra terorisme yang terdiri dari berbagai langkah yang harus didukung oleh berbagai instrumen pemerintahan serta beroperasi dalam ranah militer, ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Semua elemen ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kesuksesan dalam upaya kontra terorisme. Meskipun semua komponen tersebut penting dalam strategi kontra terorisme, aspek militer menjadi yang paling esensial. Hal ini disebabkan oleh karakteristik inti pemberontakan yang menggunakan teror sebagai alat untuk menimbulkan ketakutan bagi masyarakat dan mengikis kekuatan pemerintah yang menjadi target pemberontakannya. Oleh karena itu, dalam teorinya, Gulala lebih menyoroti pendekatan militeristik sebagai kunci utama untuk meraih keberhasilan dalam upaya kontra terorisme.

Dan dari hasil pencarian penulis, Turki semenjak 2015 telah menggunakan pendekatan militeristik untuk melawan PKK, terlihat dari reaksi militer awal Turki terhadap PKK di pusat-pusat kota di tenggara Turki selama konflik perkotaan antara 2015 dan 2016 telah membuat kemajuan yang signifikan, dan PKK kehilangan seluruh mobilisasi terorismenya dan dukungan publik di seluruh wilayah tersebut (Yesiltas 2018). Dari kejadian tersebut dapat memberikan kita bukti bahwa apa yang telah disampaikan oleh Gulala dalam bukunya ternyata masih relevan dengan langkah kontra terorisme di masa modern, yang berarti pemberontakan sebuah kelompok teroris dalam suatu wilayah dapat ditekan dengan pendekatan militeristik.

1.7 Argumen Sementara

Penulis melihat bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah Turki dengan PKK menjadi konflik yang cukup rumit karena durasi konflik yang terlalu panjang dan

hingga saat ini masih belum menemukan titik dimana konflik tersebut bisa benar-benar berakhir. Analisis strategi kontra terorisme Turki dalam melawan PKK menggunakan *Counter-Insurgency Theory* (COIN) yang dikembangkan oleh David Gulala, menunjukkan bahwa meskipun Turki telah berhasil menghancurkan infrastruktur PKK melalui operasi militer, penting juga memenangkan hati dan pikiran masyarakat serta mengisolasi pemberontak dari dukungan masyarakat sipil. Berdasarkan itu, argumen sementara penulis ialah strategi kontraterorisme Turki dapat dianalisis menggunakan teori COIN. Pendekatan teori COIN dalam strategi kontra terorisme Turki telah dilakukan dalam beberapa bidang seperti militer, ekonomi, sosial, dan politik. Namun dalam bidang politik, Turki tidak sepenuhnya menerapkan teori COIN.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk bisa menganalisis kebijakan kontra terorisme oleh Turki dari 2015 hingga 2020 secara komprehensif dalam melawan PKK.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Turki sebagai pihak yang menerima aksi pemberontakan dari PKK. Dan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah strategi kontra terorisme terhadap PKK.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah metode pengumpulan data sekunder yang menggunakan pustaka seperti buku, jurnal, dan lain-

lain yang berasal dari berbagai sumber literatur yang kredibilitasnya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis akan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian yang kredibilitasnya dapat dipercaya, yang kemudian akan dianalisa oleh penulis untuk dijadikan bahan dalam memperkuat argumen, memberikan data yang faktual, dan juga melengkapi pembahasan penulis dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Struktur dari pembahasan ini akan terdiri dari 4 bab yang masing-masing bab akan terdiri oleh beberapa sub-bab untuk menjelaskan topik-topik yang diperlukan dalam penelitian ini.

BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini akan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, kemudian metodologi penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, proses penelitian, dan yang terakhir struktur pembahasan.

BAB 2: Dinamika Hubungan Politik Antara PKK, Pemerintah Turki, dan Partai-Partai Politik Turki

Bab ini menjelaskan bagaimana hubungan antara PKK dengan politik dalam pemerintahan Turki, dan menjelaskan kebijakan hukum yang menjadi landasan strategi kontraterorisme Turki.

BAB 3: Analisis Penerapan Strategi *Counter-Insurgency* Oleh Turki Terhadap PKK

Bab ini akan lebih berfokus untuk menganalisa dengan pendekatan komprehensif mengenai kebijakan kontra terorisme Turki dalam melawan pemberontakan PKK.

BAB 4: Kesimpulan

Dan pada bab terakhir ini penulis akan merangkum kesimpulan yang didapat setelah meneliti upaya kontra terorisme apa saja yang telah dilakukan oleh Turki.

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN POLITIK ANTARA PKK, PEMERINTAH TURKI, DAN PARTAI-PARTAI POLITIK TURKI

Pembahasan mengenai hubungan antara kelompok teroris PKK (Partai Pekerja Kurdistan) dengan partai politik di Turki serta pemerintah Turki merupakan sebuah topik yang kompleks dan sensitif. Sejak berdirinya PKK pada tahun 1978, hubungannya dengan berbagai partai politik di Turki telah menjadi perhatian utama dalam analisis politik regional. Meskipun secara resmi dilarang, PKK telah memiliki keterlibatan yang beragam dalam politik Turki, baik secara langsung maupun melalui afiliasi dengan partai politik di Turki. Selain itu, hubungan antara PKK dan pemerintah Turki juga telah dipenuhi dengan konflik dan pertikaian yang melibatkan serangkaian konfrontasi militer, upaya negosiasi, serta pendekatan keamanan. Perdebatan tentang sejauh mana keterlibatan politik PKK mempengaruhi dinamika politik di Turki dan sebaliknya.

2.1 Dinamika Hubungan Antara PKK Dengan Pemerintah Turki

Hubungan antara Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan pemerintah Turki mengalami siklus ketegangan yang signifikan, mencerminkan ketidakstabilan yang mendalam di wilayah tersebut. Hubungan antara pemerintah Turki dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) telah mengalami pasang surut yang signifikan sejak awal berdirinya PKK pada tahun 1978. Dinamika ini ditandai dengan siklus kekerasan, gencatan senjata, perundingan damai, dan kembali ke konflik bersenjata.

PKK terdaftar sebagai organisasi teroris secara internasional oleh banyak negara, termasuk anggota Uni Eropa dan lainnya seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Uni Eropa juga menetapkan PKK sebagai entitas teroris pada tahun 2004 (Ministry of Foreign Affairs, n.d.).

2.1.1 Motif Pemberontakan PKK Terhadap Pemerintah Turki

Pada awalnya, motif pemberontakan PKK disebabkan oleh berbagai faktor, seperti diskriminasi, penindasan, dan pembantaian yang dilakukan oleh Turki pada masa kepemimpinan Mustofa Kemal terhadap etnis Kurdi. Contohnya termasuk larangan penggunaan bahasa Kurdi di tempat umum dan sekolah, serta pembatasan dalam aspek budaya dan politik. Meskipun penggunaan bahasa Kurdi di Turki secara resmi telah dihapus sejak masa kepemimpinan Erdogan, diskriminasi terhadap bahasa Kurdi masih berlangsung, seperti yang diungkapkan oleh Abdulhamit Gul, mantan Menteri Keadilan Turki., "Sikap-sikap marginal yang tidak kami setujui kadang-kadang terjadi. Seorang ibu dari Diyarbakir berbicara dalam bahasa Kurdi di pengadilan, tetapi dicatat sebagai 'bahasa yang tidak dikenal.' Bagaimana Anda bisa menyebut bahasa yang telah digunakan selama seribu tahun seperti itu?" (Dri 2020).

Tujuan PKK di era modern saat ini adalah untuk memperjuangkan otonomi bagi wilayah yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Kurdi. Dari sudut pandang Kurdi, ada tiga tuntutan politik yang sangat penting, yang telah disepakati secara luas dalam politik dan masyarakat sipil Kurdi: Pengakuan konstitusional atas identitas Kurdi, hak atas pendidikan dalam bahasa Kurdi dalam sistem pendidikan negara, dan penguatan pemerintahan sendiri lokal dan regional, yang digambarkan sebagai

"otonomi demokratis" (Demirtas 2013). Dan seluruh tuntutan tersebut selalu ditolak pemerintah Turki yang menjadi alasan mengapa PKK hingga saat ini terus melakukan aksinya. Motif dari tujuan ini adalah bahwa wilayah Turki tenggara, yang mayoritas penduduknya adalah etnis Kurdi, mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Dengan tercapainya tujuan tersebut, wilayah tersebut diharapkan dapat memiliki kemandirian untuk mengelola urusan internalnya, meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kurdi, dan menciptakan keseimbangan kekuatan. Meskipun wilayah tersebut memperoleh otonomi, ia tetap berada dalam kerangka hukum dan konstitusi negara Turki. Dengan cara ini, manfaat yang diharapkan bagi bangsa Kurdi di Turki meliputi pengakuan identitas Kurdi melalui keterlibatan etnis Kurdi dalam pemerintahan lokal, peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan pengurangan ketegangan karena Turki telah memberikan keadilan bagi masyarakat Kurdi.

2.1.2 Upaya Perdamaian PKK dengan Pemerintah Turki

Upaya untuk perdamaian antara Turki dan PKK bermula pada saat penangkapan Abdullah Ocalan pada 1998 yang mendorong PKK menghindari bentuk-bentuk kekerasan dari tahun 1999 sampai bulan Juni 2004, ketika sayap militan garis kerasnya mengambil alih dan mengumumkan gencatan senjata yang telah dikenakan sendiri oleh PKK (*Rewards For Justice* n.d.). Dan juga di saat Erdogan naik menjadi perdana menteri Turki menggantikan Abdullah Gul. Sejak menjabat pada tahun 2003, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan telah memberi isyarat bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi) mungkin bersedia untuk mengatasi

tuntutan politik Kurdi untuk lebih banyak hak dan untuk melakukan negosiasi perdamaian dengan PKK (Nykänen 2023). Hal ini tentu menjadi harapan bagi kedua belah pihak untuk bisa mengakhiri konflik yang telah terjadi selama beberapa dekade dan menewaskan puluhan ribu orang. Erdogan bersama partainya menjadi tokoh politik Turki yang memimpin pencarian upaya solutif dan efektif bagi Turki, PKK, dan bangsa Kurdi yang mendiami Turki secara keseluruhan, pada tahun 2009, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) meluncurkan Inisiatif Kurdi Turki, serangkaian reformasi sosial, politik, dan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan hak-hak kewarganegaraan bagi warga Turki keturunan Kurdi (Kocer and Goztepe 2017). Namun rencana ini tidak berjalan lancar, karena kelompok nasionalis yang tergabung dalam CHP (*Cumhuriyet Halk Partisi*) sebuah partai dengan ideologi Kemalis di Turki, menolak dengan tegas Inisiatif Kurdi, padahal PKK yang notabenenya adalah musuh yang berbahaya bagi Turki, menunjukkan kesediaannya untuk mendukung rencana tersebut, terbukti dari PKK mengirim 34 militan dan pengungsi dari markas besar Kandil dan kamp pengungsi Maxmur pada bulan November 2009 untuk menunjukkan kesediaannya untuk menemukan solusi (Yeğen 2015). Ketika Erdogan naik jabatan menjadi presiden Turki, dia mengadopsi pendekatan yang lebih tegas daripada masa jabatannya sebagai perdana menteri. Dalam menghadapi PKK, pendekatan Erdogan menonjol dengan strategi militer yang agresif, berbeda dengan pendekatan diplomatis yang lebih ditekankan oleh presiden sebelumnya, Abdullah Gul.

Harapan muncul ketika PKK dan Turki sepakat untuk mengadakan gencatan senjata. Sebelumnya, sejak pembentukannya hingga tahun 2013, gencatan senjata

selalu diberlakukan secara sepihak oleh PKK. Momen gencatan senjata pada tahun 2013 meningkatkan harapan bagi seluruh masyarakat Turki untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Konflik tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak, termasuk masyarakat sipil yang terdampak. Perundingan perdamaian antara PKK dan Turki dimulai dengan hati-hati pada saat Recep Tayyip Erdogan menjadi perdana menteri Turki pertama yang secara terbuka terlibat dalam dialog dengan pemimpin PKK yang dipenjara, Abdullah Ocalan, yang dianggap musuh nomor satu negara. Setelah deklarasi gencatan senjata pada 21 Maret, komandan pemberontak Murat Karayilan mengumumkan penarikan pasukan PKK yang berada di Turki (Constanze 2013). Ini menunjukkan keinginan Erdogan untuk menemukan solusi damai dalam menghadapi PKK.

2.1.3 Perjanjian Dolmabahce

Pada tanggal 28 Februari 2015, pemerintah Turki dan perwakilan PKK, yang diwakili oleh HDP, mengumumkan sebuah perjanjian damai. Perjanjian ini disepakati di wilayah yang disebut Dolmabahce, dan kemudian dikenal sebagai Perjanjian Dolmabahce. Perjanjian ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak dan mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Perjanjian tersebut memperkenalkan pendekatan baru dengan mengkaji ulang hubungan antara negara-warga, negara-masyarakat, dan berbagai identitas, serta menetapkan politik yang demokratis. Cara dan metode untuk menyelesaikan masalah-masalah historis Turki melalui kekuatannya sendiri diungkapkan dalam Perjanjian Dolmabahçe (ANF 2022).

HDP memandang bahwa perjanjian ini merupakan solusi terbaik bagi hubungan Turki dan PKK untuk mencapai perdamaian sejati.

Meskipun perjanjian ini dinyatakan oleh kedua belah pihak pada waktu dan tempat yang bersamaan, perjanjian ini sebenarnya tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah Turki. Perwakilan Turki, termasuk Wakil Perdana Menteri Yalçın Akdoğan, Menteri Dalam Negeri Efkan Ala, Wakil Ketua Kelompok AKP Mahir Ünal, dan Sekretaris Jenderal Keamanan dan Ketertiban Publik Muhammed Dervişoğlu, tidak dapat menyatakan pandangan resmi pemerintah Turki karena Presiden Erdogan menolak perjanjian tersebut. Terbukti dari pernyataan Erdogan kepada reporter beberapa bulan setelah pengumuman Perjanjian Dolmabahce, "Saya tidak mengakui istilah 'Perjanjian Dolmabahçe.' Ada pemerintah yang sah. Jadi, ada sebuah partai politik dengan basis massa yang berhubungan dengan PKK. Jika ada langkah yang harus diambil untuk masa depan negara kita, itu harus dilakukan di parlemen. Tidak bisa ada perjanjian dengan partai politik yang didukung oleh organisasi teroris."(Hurriyet 2015). Pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa jika pemerintah dan PKK ingin mendiskusikan dan menetapkan sebuah perjanjian, langkah-langkahnya harus mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan negara. Menurut pandangan ini, keputusan yang berdampak pada masa depan negara harus dilakukan melalui jalur resmi, seperti melalui parlemen, untuk memastikan legitimasi dan representasi yang tepat bagi seluruh rakyat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya Perjanjian Dolmabahce selain pernyataan Erdogan yang menolak perjanjian tersebut. Salah satunya adalah

kurangnya komitmen dari kedua belah pihak untuk melanjutkan langkah-langkah dalam perjanjian yang sejak awal terlalu luas dan tidak merinci. Terdapat tiga janji utama yang seharusnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak, namun tidak berhasil tercapai. Ketiga janji tersebut adalah penyelesaian penghentian lintas batas, penghentian tindakan yang merugikan keamanan publik, dan kepatuhan terhadap Pernyataan Dolmabahçe (ÇiÇek and Coşkun 2016). Kedua belah pihak ini saling menuduh dan menyalahkan atas kurangnya komitmen dari pihak lain untuk memenuhi janji-janji yang telah disepakati. Ketidakmampuan untuk merealisasikan langkah-langkah konkret ini menjadi hambatan besar dalam mencapai perdamaian yang diharapkan, dan menambah ketegangan serta ketidakpercayaan antara pemerintah Turki dan PKK.

Ketiadaan detail operasional yang jelas membuat implementasi perjanjian sulit dan rentan terhadap interpretasi yang berbeda, sehingga menghambat kemajuan nyata menuju perdamaian. Ketidakpercayaan dan kecurigaan yang mendalam antara pemerintah Turki dan PKK juga menghalangi upaya untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan efektif.

2.1.4 Berakhirnya Gencatan Senjata pada 2015

Bulan Juli 2015 menjadi titik balik dalam hubungan antara Turki dan PKK setelah periode yang relatif damai selama dua tahun melalui perjanjian gencatan senjata. Serangkaian serangan teroris yang terjadi pada saat itu mendorong Turki untuk meningkatkan tindakan militer dengan skala yang lebih besar dari sebelumnya. Turki pada akhirnya memutuskan untuk mengadopsi pendekatan militeristik sebagai upaya

terakhir untuk membasmi terorisme dan mencapai kedamaian. Langkah ini menandai perubahan besar dalam strategi Turki dalam menangani konflik dengan PKK, yang sebelumnya telah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan negosiasi.

Karena runtuhnya perjanjian gencatan senjata pada 2015, konflik antara Turki dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) telah memakan lebih dari 5.850 nyawa setelah gencatan senjata selama dua setengah tahun runtuh, konflik ini menjadi salah satu babak paling mematikan dalam sejarahnya, Turki semakin mengandalkan kekuatan udara dalam perang melawan PKK (Mandiraci 2022). Operasi militer ini menunjukkan keseriusan Erdogan dalam menghadapi PKK setelah upaya-upaya damai tidak membuahkan hasil.

Pada periode ini, Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mengadopsi sikap yang semakin keras terhadap PKK. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Senin mengatakan bahwa waktu untuk pembicaraan damai dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang telah berakhir dan berjanji untuk menumpas kelompok tersebut sekali dan untuk selamanya (The New Arab 2016). Pemerintah Turki meningkatkan operasi militer dan keamanan di provinsi-provinsi tenggara seperti Diyarbakır, Şırnak, dan Hakkari. Konflik ini mengakibatkan banyak korban jiwa, baik dari pihak militer Turki maupun anggota PKK, serta warga sipil, selain ribuan orang yang dibunuh dan dipenjara, PBB menyatakan sekitar 350.000 dan 500.000 orang mengungsi karena perang dari bulan Juli 2015 sampai Desember 2016 (BBC 2017). Selain itu, banyak desa dan kota di

kawasan tersebut mengalami kerusakan yang parah akibat bentrokan antara pasukan keamanan dan militan PKK.

Selain aksi militer, pemerintah Turki juga melakukan tindakan represif lainnya terhadap individu dan kelompok yang diduga memiliki hubungan dengan PKK. Banyak politisi dari Partai Demokratik Rakyat (HDP), yang dianggap memiliki afiliasi dengan gerakan Kurdi, ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. polisi Turki menahan selusin anggota parlemen fraksi Partai Rakyat Demokratik atau HDP yang pro Kurdi, partai politik terbesar ketiga di negara itu, di antara mereka yang ditangkap adalah wakil pemimpin HDP, Selahattin Demirtas, dan Figen Yuksekdag (VOA 2016). Situasi ini tentu memperburuk hubungan antara pemerintah Turki dan masyarakat Kurdi secara lebih luas

Semakin intensif operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Turki, ternyata tidak menyurutkan semangat PKK untuk melawan balik. Kelompok ini tetap menunjukkan tekad yang kuat dan terus melakukan perlawanan, meskipun menghadapi tekanan militer yang semakin meningkat. PKK tetap gigih dalam mempertahankan posisinya dan melanjutkan aksi-aksi mereka meskipun pemerintah Turki meningkatkan upaya perlawanan dan operasi-operasi militer secara agresif. Terbukti dari wawancara dengan Pemimpin Partai Pekerja Kurdistan (PKK) Cemil Bayik mengatakan bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan sedang "meningkatkan perang ini". "Kurdi akan mempertahankan diri hingga akhir, selama pendekatan Turki seperti ini - tentu saja PKK akan meningkatkan perang," katanya (Pannell 2016). Pernyataan dan tindakan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam

konflik ini justru menjadi bahan bakar yang semakin meningkatkan eskalasi konflik di Turki.

2.2 Dinamika Politik Antara PKK Dengan Partai-Partai Politik Turki

PKK telah beberapa kali berupaya menjalin hubungan dengan beberapa partai politik di Turki. Alasan utama PKK melakukan ini adalah karena partai-partai politik tersebut memperjuangkan hak-hak bangsa Kurdi yang telah tertindas sejak pembentukan negara Turki. Namun, hubungan-hubungan ini seringkali diwarnai oleh dinamika dan ketegangan.

2.2.1 Dinamika Hubungan PKK dan AKP

Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) didirikan pada tanggal 14 Agustus 2001 oleh sekelompok politisi yang sebagian besar berasal dari latar belakang Islam konservatif. Mereka ingin membawa perubahan dalam politik Turki dengan mendasarkan pada nilai-nilai Islam dan reformasi ekonomi. Menurut salah satu mantan menteri Turki yang bernama Hüseyin Çelik, "Partai Keadilan dan Pembangunan Turki merupakan sebuah partai berhaluan demokratis konservatif terhadap nilai moral dan sosial (Tepe 2005). Sejak didirikan pada tahun 2001, AKP telah menjadi kekuatan politik dominan di Turki, memimpin pemerintahan sejak tahun 2002. Di tengah upaya untuk memperkuat stabilitas politik dan ekonomi di Turki, AKP telah berurusan dengan berbagai tantangan, termasuk konflik bersenjata dengan PKK yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Hubungan antara AKP dan PKK telah dipengaruhi oleh dinamika politik internal dan eksternal yang melibatkan perubahan kebijakan, negosiasi, konfrontasi militer, serta upaya perdamaian.

Pada awal berdirinya, AKP berusaha membangun hubungan yang baik dengan PKK. Erdogan sebagai pendiri sekaligus ketua umum AKP, berjanji untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Kurdi Turki, terbukti dari AKP yang merencanakan Inisiatif Kurdi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan atmosfer sosial dan politik di Turki, yaitu keinginan AKP untuk memenuhi standar demokrasi Uni Eropa, kekhawatirannya terhadap berkurangnya dukungan Kurdi dalam pemilihan tahun 2007, hubungan Turki yang membaik dengan AS, hubungan yang membaik dan operasi militer di Irak Utara, serta kematangan keseluruhan dari Turki yang menjadi lebih liberal dan berpikiran terbuka (Kirisci and Somer, n.d.).

Namun hubungan kedua belah pihak tersebut bersifat dinamis hingga pada akhirnya pada 2015, saat gencatan senjata yang telah dijalin sejak 2013 berakhir karena serangan PKK yang menargetkan militer Turki mengakhiri hubungan baik yang telah diperjuangkan selama lebih dari satu dekade. Hubungan antara PKK dan AKP sangat terkait dengan hubungan mereka dengan pemerintah Turki, mengingat bahwa AKP adalah partai politik yang saat ini paling berkuasa dalam pemerintahan, dengan Erdogan memegang kedudukan sebagai presiden Turki sekaligus sebagai pemimpin AKP.

2.2.2 Dinamika Hubungan PKK dan MHP

Miliyetci Hareket Partisi (MHP) adalah partai yang paling berkuasa di Turki setelah AKP, partai ini memiliki sejarah yang panjang dan berakar dalam gerakan nasionalis di Turki. Partai ini didirikan pada tanggal 9 Februari 1969 oleh sekelompok politisi yang menganut ideologi nasionalis Turki yang keras. Selama awal

pembentukannya, MHP menekankan pada kesatuan nasional, kebanggaan budaya Turki, dan kebijakan yang mendukung kepentingan Turki secara keseluruhan.

Karena ideologi yang dipegang teguh oleh MHP sejak awal didirikan, MHP secara konsisten menolak gagasan kemerdekaan bagi bangsa Kurdi dan menegaskan penolakan mereka terhadap segala bentuk hubungan dengan PKK. MHP secara agresif menentang kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat mengganggu identitas nasional Turki dan memperkuat identitas bangsa Kurdi di dalam negara, seperti menolak penggunaan bahasa Kurdi dalam lembaga pemerintahan dan menentang kebijakan *Democratic Opening* yang bertujuan untuk menormalisasi isu Kurdi dan mencari solusi melalui jalur sipil. MHP skeptis terhadap perubahan hukum yang diusulkan dalam pembukaan ini dan menolak beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah, seperti penggunaan bahasa Kurdi dan pengakuan identitas Kurdi (Insight Turkey 2010). MHP selalu menegaskan sikap konservatifnya dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Kurdi, dan bersikap keras dalam menghadapi PKK.

Namun, dibalik ketegasannya dalam menghadapi bangsa Kurdi, MHP tidak memiliki niat untuk mengusir bangsa Kurdi sepenuhnya dari wilayah Turki. Sebaliknya, mereka menganut ide asimilasi bagi bangsa Kurdi ke dalam negara Turki, dengan harapan bahwa bangsa Kurdi dapat menyatu dengan budaya Turki yang ada.

2.2.3 Dinamika Hubungan PKK dan CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adalah salah satu partai politik tertua dan paling berpengaruh di negara tersebut, dengan akar sejarahnya yang terjalin erat dengan

pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Partai ini didirikan pada tanggal 9 September 1923, hanya beberapa bulan setelah pendirian Republik Turki. Pada tahun 1927, "Republikanisme", "Populisme", "Nasionalisme" dan "Sekulerisme" diadopsi sebagai empat prinsip dasar CHP. Pada tahun 1935, asas Partai ditambah menjadi enam dengan menambahkan asas “Statisme” dan “Revolusionisme”. Enam anak panah yang merupakan lambang partai melambangkan prinsip-prinsip tersebut (CHP, n.d.). CHP memposisikan dirinya sebagai partai sayap “kiri tengah” dalam pemerintahan Turki.

CHP menjadi salah satu partai politik yang memberi respon positif bagi isu bangsa Kurdi Turki. Dengan landasan ideologinya, Partai Rakyat Republik (CHP) turut memperjuangkan peningkatan pengakuan terhadap hak-hak bangsa Kurdi agar dapat hidup setara di dalam struktur negara Turki. Kemal Kilicdaroglu mengatakan bahwa isu-isu terkait Kurdi sangat penting untuk diselesaikan di dalam parlemen (Rudaw 2023). Pendekatan ini mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat. CHP menganggap penting untuk memastikan bahwa semua warga negara Turki, termasuk bangsa Kurdi, memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar, layanan publik, dan peluang ekonomi.

Meskipun CHP memperjuangkan peningkatan pengakuan hak-hak bagi bangsa Kurdi di dalam negara, mereka tetap mengutuk tindakan kekerasan dan terorisme yang dilakukan oleh PKK dan menolak dengan tegas tuntutan kemerdekaan bagi bangsa Kurdi. Dalam menanggapi ancaman yang disebabkan oleh PKK, CHP cenderung memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang keras dan tegas untuk

meredakan ketegangan yang timbul akibat konflik antara PKK dan militer Turki. CHP memandang perlunya langkah-langkah yang kuat untuk menegakkan kedaulatan negara dan memastikan keamanan serta stabilitas di wilayah yang terkena dampak konflik tersebut.

2.2.4 Dinamika Hubungan PKK dan HDP

Halklarin Demokratik Partisi (HDP) adalah partai yang tergolong masih muda dibandingkan partai-partai sebelumnya yang telah dijelaskan, Partai Demokratik Rakyat (HDP - *Halkların Demokratik Partisi*) secara resmi didirikan pada tahun 2012 dan mulai aktif secara politik pada 27 Oktober 2013 setelah mengadakan kongres luar biasa pertamanya (Global Security 2016). Sama seperti CHP, HDP memposisikan partainya di sayap "kiri tengah". Pendirian HDP sendiri diinisiasi oleh *Hareket Demokratik Kurdi* (HDK) yang merupakan sebuah koalisi politik yang didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak etnis Kurdi dan agenda-agenda progresif di Turki.

HDP seringkali dianggap memiliki keterkaitan yang kuat dengan PKK, bahkan beberapa anggotanya dianggap sebagai anggota aktif PKK. Keterlibatan ini memunculkan pertanyaan tentang hubungan antara partai politik dan kelompok bersenjata, serta menimbulkan kekhawatiran akan pengaruh PKK dalam ranah politik di Turki. Dalam salah satu konferensinya, pendukung HDP datang berpakaian seperti gerilyawan PKK, dan banyak anggotanya memegang spanduk bergambar pendiri PKK, Abdullah Ocalan, yang dipenjara. Memang benar pesan Ocalan dibacakan pada hari itu, di mana saudara laki-laki Abdullah Ocalan, Mehmet Ocalan, termasuk di

antara para tamu (The New Arab 2015). Konferensi tersebut semakin menunjukkan hubungan yang erat antara HDP dan PKK.

Berdasarkan latar belakangnya, HDP menganut paham anti-kapitalisme dan memiliki cita-cita untuk mengakhiri diskriminasi berdasarkan agama, gender, dan ras. Mereka memperjuangkan nilai-nilai egaliter dan keadilan sosial dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga Turki. Tidak mengherankan jika HDP menjadi partai yang paling banyak didukung oleh bangsa Kurdi Turki, serta mendapatkan dukungan dari aktivis kemanusiaan. Pemilihan umum Turki pada Juni 2015 menandai kemenangan bersejarah bagi partai politik Kurdi, HDP (Partai Demokratik Rakyat). Untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Turki, sebuah partai politik Kurdi, tanpa aliansi partai, berhasil melewati ambang batas parlemen sebesar 10 persen dengan memperoleh 13,1 persen suara di Turki. Dengan demikian, HDP mendapatkan tempat di parlemen untuk mewakili suara-suara Kurdi di negara yang secara historis menindas rakyat Kurdi (Shirwan 2023).

2.3 Kebijakan Hukum dalam Kontraterorisme Turki

Untuk melaksanakan strategi kontraterorismenya, pemerintah Turki memerlukan landasan hukum sebagai dasar penerapan kebijakannya. Salah satu hukum yang mendukung strategi ini adalah Undang-Undang Anti-Teror No. 3731 yang dibentuk pada 12 April tahun 1991, Undang-undang ini disahkan pada tahun 1991 sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman terorisme dari berbagai kelompok, termasuk PKK yang terlibat dalam aktivitas terorisme dan serangan terhadap negara Turki (Human Rights Association, n.d.). Landasan hukum ini memberikan definisi mengenai

terorisme dan memberikan wewenang yang luas bagi Turki untuk melaksanakan strategi kontraterorismenya kepada PKK. Kerangka kebijakan ini telah memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk menerapkan strategi kontraterorisme yang tegas terhadap PKK.

Tidak hanya itu saja, Turki juga memiliki landasan hukum untuk menangkap para pendukung PKK, yaitu Undang-undang khusus tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme (Undang-Undang No. 6415) yang telah berlaku di Turki sejak tahun 2013. Undang-undang ini diadopsi dengan tujuan untuk memerangi terorisme dan pendanaannya, menggabungkan prinsip-prinsip dan prosedur dalam penerapan Konvensi Internasional untuk Penindakan Pendanaan Terorisme serta Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan (Amnesty International 2020). Undang-Undang No. 6415 menetapkan ketentuan mengenai pelanggaran pendanaan terorisme dan menyediakan mekanisme untuk pembekuan aset dengan tujuan mencegah pendanaan teroris. Undang-undang ini melarang pengumpulan atau penyediaan dana untuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran terorisme.

Undang-undang anti terorisme yang ketat, serta berbagai dekrit dan regulasi terkait keamanan nasional, memungkinkan pemerintah untuk melancarkan operasi militer, melakukan penangkapan massal, dan mengambil tindakan keras terhadap individu dan kelompok yang diduga terlibat dalam kegiatan teroris. Melalui kerangka hukum ini, Turki dapat secara resmi membenarkan tindakan-tindakan kontraterorisme yang agresif dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

BAB III

ANALISIS PENERAPAN STRATEGI *COUNTER-INSURGENCY* OLEH TURKI TERHADAP PKK

Tepat pada 20 Juli 2015, terjadi sebuah pengeboman di wilayah Suruc. Pengeboman ini terjadi saat sekelompok aktivis muda sedang berunjuk rasa untuk menyatakan keinginan mereka membangun kembali kota Kobani, yang sebelumnya menjadi wilayah pertempuran antara pejuang Kurdi dan ISIS. Peristiwa ledakan yang diduga disebabkan bom bunuh diri ini menewaskan 32 orang yang mayoritas adalah aktivis muda (Utami 2015). Pengeboman ini berdampak buruk pada hubungan Turki dengan PKK.

Perjanjian Dolmabahce, yang sejatinya menjadi harapan bagi suku Kurdi untuk mendapatkan hak-haknya berakhir gagal karena perjanjian ini tidak dapat diresmikan karena tidak melalui jalur resmi dan karena pandangan Erdogan yang menganggap bahwa partai HDP, yang ikut menyatakan perjanjian ini, memiliki hubungan erat dengan PKK. Bahkan karena penolakan ini, HDP menganggap pemerintah tidak menginginkan perdamaian, karena pemerintah AKP yang berkuasa mendukung perang dan kekerasan serta menolak Perjanjian Dolmabahçe (ANF 2022). Kekecewaan PKK terhadap kegagalan perjanjian ini, yang seharusnya membawa perubahan positif bagi suku Kurdi, turut memupuk amarah dan rasa tidak percaya terhadap pemerintah Turki.

PKK juga menduga bahwa Turki dan ISIS bekerja sama dalam pengeboman Suruc. Ocalan menuduh Turki menghambat perundingan damai yang bertujuan

mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tiga dekade, sementara Murat Karayılan, seorang komandan PKK yang berbasis di Irak utara, menuduh Turki berkolaborasi dengan militan ISIS dan menyatakan bahwa proses perdamaian telah berakhir (Alarabiya 2014). Dugaan atas konspirasi ini mendorong PKK untuk kembali melakukan aksi terornya. Aksi teror yang kembali dilakukan oleh PKK pasca pengeboman Suruc, akhirnya mendorong Turki untuk membuat keputusan langkah kontra terorisme yang lebih masif melalui langkah militeristik.

Beberapa lembaga pemerintahan yang terlibat dalam strategi kontraterorisme Turki meliputi Direktorat Jenderal Keamanan (*Emniyet Genel Müdürlüğü*), yang merupakan lembaga utama di bawah Kementerian Dalam Negeri Turki, bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keamanan publik. Selain itu, Angkatan Bersenjata Turki (*Türk Silahlı Kuvvetleri* - TSK), yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Turki, memainkan peran utama sebagai ujung tombak dalam penyerangan terhadap PKK. Dan Kepolisian Anti-Teror (*Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü*) juga berperan penting dengan berkolaborasi dengan militer untuk melawan dan menangkap anggota teroris serta para pendukungnya.

3.1 Langkah Pertama: Penghancuran atau Pengusiran Pasukan Pemberontak

Aksi teror yang kembali dilakukan PKK menjadi *Casus Belli* bagi Turki untuk mengakhiri gencatan senjata dan kembali melakukan serangan pada PKK yang mengarah ke basis-basis wilayah yang dikuasai oleh PKK di wilayah perbatasan Turki tenggara. *Casus Belli* adalah istilah Latin yang digunakan untuk menggambarkan situasi yang membenarkan suatu negara memulai perang (Ray, n.d.). Istilah ini

merujuk pada tindakan atau insiden seperti provokasi, serangan, atau pelanggaran kedaulatan yang dianggap cukup serius untuk memicu respon militer.

Dengan menerapkan pendekatan COIN, dalam langkah pertama, Turki menggunakan dua strategi utama dalam melawan PKK, yaitu serangan udara dan operasi darat. Serangan udara menggunakan pesawat pengebom untuk menghancurkan markas PKK di daerah pegunungan yang sulit dijangkau oleh pasukan darat, serta menyerang langsung kelompok-kelompok anggota PKK. Sementara itu, operasi darat melibatkan kerjasama antara militer dan kepolisian, tidak hanya untuk menumpas anggota PKK, tetapi juga untuk menangkap mereka yang diduga mendukung PKK, termasuk warga sipil. Kombinasi antara serangan udara dan operasi darat ini dirancang untuk memberikan tekanan maksimal pada PKK, menghancurkan infrastruktur mereka, serta menangkap atau mengeliminasi anggota-anggotanya. Dengan strategi ini, Turki berharap dapat melemahkan PKK secara signifikan dan mengurangi ancaman yang mereka timbulkan terhadap keamanan dan stabilitas negara.

Misi penyerangan pertama Turki setelah berakhirnya gencatan senjata yang telah berlangsung selama dua tahun terjadi ketika Turki mengirimkan pasukan udaranya untuk menyerang ISIS dan PKK di sekitar wilayah perbatasan selatan dan tenggara Turki. Turki telah melancarkan serangan udara terhadap Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Irak utara, dengan lebih banyak serangan dikatakan akan menyusul, mengancam untuk mengakhiri gencatan senjata selama dua tahun antara kelompok yang dilarang di Turki tersebut dan pemerintah (Weise and Stevenson 2015). Misi ini dikenal dengan nama *Martyr Yalcin Operation*, operasi ini dinamai dari seorang

tentara Turki yang tewas terbunuh dalam serangan teroris. Pada 24 Juli 2015, pemerintahan Turki meluncurkan Operasi *Martyr Yalçın*, yang diduga untuk membantu mengalahkan Negara Islam (ISIS). Namun, sebagian besar serangan udara Turki diarahkan terhadap sasaran PKK di Irak Utara, dan invasi terbaru ke Irak dengan pasukan darat mengkonfirmasi bahwa ini adalah prioritas utama. PKK merespons dengan serangan terhadap tentara dan polisi di dalam Turki, memicu spiral penangkapan dan pertumpahan darah (Dray 2015). Sebagai aksi balas dendam, Turki kemudian mengebom basis-basis kelompok PKK dan menamai misinya dengan nama tentara yang telah gugur tersebut. Operasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menghormati prajurit yang tewas sekaligus mengirim pesan kuat kepada PKK tentang keseriusan mereka dalam memerangi terorisme. Dari 24 Juli hingga akhir bulan, militer Turki melakukan delapan gelombang serangan udara terhadap posisi PKK di Irak utara dan di dalam Turki - menewaskan sekitar 250 militan PKK, menurut sumber militer Turki (Goksel 2015). Penyerangan ini menjadi langkah pertama bagi Turki untuk menerapkan strategi kontra terorisme terhadap PKK setelah berakhirnya gencatan senjata.

Gambar 1. Penyerangan Militer Turki Terhadap PKK



Sumber: Wikipedia

Gambar diatas menampilkan titik-titik dimana pangkalan militer udara Turki menyerang wilayah-wilayah yang menjadi target penyerangan karena telah menjadi markas PKK. Setelah menggunakan pasukan udaranya untuk melakukan serangan awal, kemudian Turki menurunkan pasukan daratnya untuk melawan anggota PKK yang tersisa.

Dalam operasi ini terdapat beberapa kepentingan yang ingin dicapai oleh Turki. Pertama, Turki ingin melemahkan basis kekuatan musuh dengan menyerang markas ISIS dan PKK di wilayah utara Irak. Kedua, Turki juga ingin mencegah potensi pemberontakan di dalam negeri yang dapat muncul akibat dorongan dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh suku Kurdi. Kemungkinan adanya dorongan kuat bagi suku Kurdi untuk membangun negara mereka sendiri dari wilayah yang dikuasai ini

menjadi keprihatinan bagi Turki, dan oleh karena itu, mereka melakukan operasi untuk mengurangi potensi ancaman ini.

Wilayah yang diincar selanjutnya adalah wilayah di bagian perbatasan antara Turki dan Suriah, Turki percaya bahwa Kurdi sedang membentuk negara mereka sendiri di Suriah utara dan hal itu akan mendorong sentimen separatis di kalangan populasi Kurdi di dalam negeri (Khodr 2015). Upaya pencegahan ini perlu dilakukan demi mengendalikan potensi ketegangan dalam negeri, karena setelah dilakukannya operasi ini, suku Kurdi yang tinggal di dalam Turki mulai melakukan berbagai aksi untuk mengecam dan bahkan melawan pemerintah Turki karena penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada 4 September 2015 Turki melakukan operasi militer kontra terorisme di kota Cizre yang menjadi salah satu wilayah yang sebagian besar masyarakatnya beretnis Kurdi dan juga menjadi markas PKK, Turki menggambarkan Cizre sebagai pusat aktivitas PKK, dengan seorang pejabat mengatakan bahwa mereka percaya ada 80 pejuang profesional PKK yang beroperasi di sana dan sekitar 200 pemuda telah mengangkat senjata (Selin 2015). Operasi ini dilakukan selama seminggu penuh dengan memblokade jalan keluar masuknya kota dan pemberlakukan jam malam.

Pada bulan yang sama, pada 27 September, Turki mulai melakukan operasi militer dengan skala yang lebih besar di wilayah Hakkari, Kantor berita resmi *Anadolu Agency* (AA) melaporkan bahwa sumber-sumber militer lokal mengatakan operasi di Hakkari berlangsung dari 27 September hingga 5 November dan menargetkan persembunyian gunung PKK, menyita atau menghancurkan senjata anti-pesawat dan

senjata berat lainnya (Rudaw 2015). Dan militer Turki telah berhasil membersihkan basis teroris PKK di pegunungan yang terletak di provinsi Hakkari tenggara dalam operasi berkelanjutan yang berlangsung selama 40 hari, dan telah menewaskan 119 teroris (Daily Sabah 2016). Operasi militer yang berlangsung lebih dari satu bulan ini memprioritaskan penghancuran basis-basis PKK yang telah memiliki alat-alat pertahanan diri yang dipasang pada saat gencatan senjata.

Konflik jelas terkonsentrasi di provinsi-provinsi yang didominasi oleh Kurdi seperti Diyarbakır, Mardin, Şırnak, dan Hakkari. Lebih dari sepertiga dari semua korban tercatat di provinsi-provinsi ini, sementara distrik Sur (provinsi Diyarbakır), Nusaybin (Mardin), dan Cizre (Şırnak) telah mengalami jumlah korban tertinggi sejak Juli 2015 (ISDP 2016). Wilayah tenggara dan timur Turki memang sejak lama dihuni mayoritas oleh bangsa Kurdi. Bahkan, dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan bagian dari wilayah yang oleh banyak orang disebut sebagai "Negara Kurdistan", yang mencakup sebagian besar wilayah tenggara Turki. Dan tidak aneh jika wilayah ini menjadi pusat tempat tinggal dan berkumpulnya anggota-anggota PKK

Langkah kontra terorisme Turki yang dimulai sejak Juli 2015 telah memberikan kerugian besar bagi PKK. Hingga akhir tahun, Turki berhasil membunuh ribuan anggota PKK dan menyita ribuan senjata mereka. Menteri Dalam Negeri Turki Efkan Ala mengatakan bahwa lebih dari 3 ribu teroris telah tewas dalam operasi sejauh ini dan 2.240 senjata, 862 di antaranya adalah senjata berat dan laras panjang, 10 ton bahan peledak, serta 10 ribu bom molotov telah disita (Sabah 2015). Meskipun langkah-langkah kontra terorisme yang diambil oleh pemerintah Turki belum

sepenuhnya mencapai hasil yang diinginkan, terbukti dari hanya sedikitnya penurunan intensitas serangan PKK, hal ini tidak mengurangi semangat dan komitmen pemerintah Turki untuk memberantas teroris.

Hingga pada akhirnya di bulan Juni 2016, pemerintah Turki menyatakan keberhasilan sekaligus berhentinya operasi militer Turki tenggara, Perdana Menteri Binali Yıldırım telah menyatakan berakhirnya operasi militer di tenggara Turki dan mengatakan bahwa pemerintah memasuki "fase kedua" dengan meluncurkan kampanye besar-besaran untuk merekonstruksi kota-kota yang rusak akibat bentrokan antara pasukan keamanan dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang (Hurriyet 2016). Di bulan yang sama, Erdogan juga menyampaikan keberhasilan dirinya dan partainya dalam melawan teroris, Presiden Recep Tayyip Erdoğan menyatakan bahwa organisasi masyarakat sipil yang "bertindak melawan negara" sebagian besar telah "hancur" selama masa pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) sejak tahun 2002 (Hurriyet 2016b). Para pemimpin Turki telah menegaskan keberhasilan negara dalam melawan terorisme. Namun, pernyataan ini disayangkan oleh pihak seperti partai HDP, yang menganggap langkah-langkah kontra terorisme Turki selama setahun terakhir telah menimbulkan kerugian besar bagi negara, terutama dalam hal korban jiwa yang mayoritas adalah warga suku Kurdi.

3.2 Langkah Kedua: Penerjunan Unit Statis

Penghancuran dan pengusiran pasukan PKK di wilayah tenggara Turki dan perbatasannya di sebelah selatan dengan Suriah berhasil memberikan pukulan telak bagi PKK, melemahkan kekuatan dan pengaruh mereka di daerah tersebut.

Berdasarkan teori COIN yang dijelaskan oleh David Gulala, langkah selanjutnya setelah serangan awal adalah penerjunan unit statis. Langkah ini menjadi krusial karena menentukan keberlanjutan dan efektivitas strategi kontra terorisme secara keseluruhan.

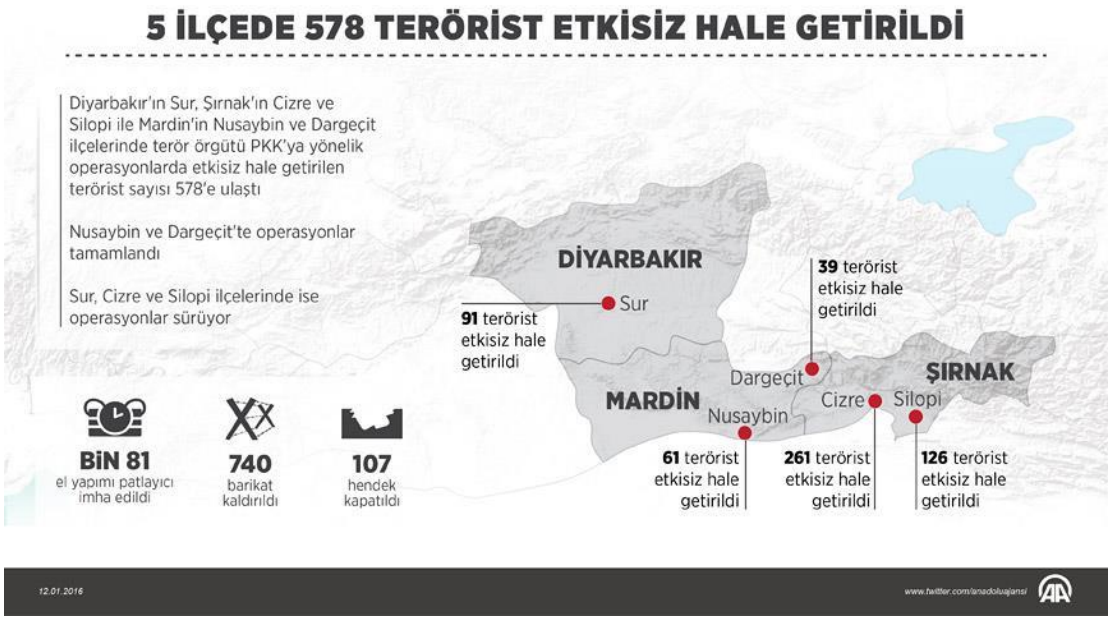
Setelah Turki menerjunkan pasukan untuk melakukan pertempuran darat langsung dengan PKK, pemerintah kemudian menempatkan unit-unit militer di wilayah Sur, Silopi, Kaynartape, dan Nusaybin yang sebelumnya telah diserang oleh militer Turki. Wilayah-wilayah ini dikenal sebagai sarang PKK, sehingga penempatan unit-unit militer di sana bertujuan untuk memastikan bahwa PKK tidak dapat kembali menguasai daerah tersebut. Untuk menghadapi langkah militan PKK, mereka membangun barikade, menggali parit, dan menanam peledak di kawasan itu (Debora 2016).

Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah kebangkitan kembali kelompok PKK, dan menjaga agar mereka tidak dapat mereorganisasi dan menguatkan diri lagi. Selain itu, penerjunan unit statis bertujuan untuk melindungi warga sipil dari ancaman perekrutan oleh PKK, memastikan bahwa penduduk setempat tetap aman dan tidak terpengaruh oleh ideologi atau aktivitas teroris. Langkah ini mencerminkan pendekatan yang berkelanjutan dan komprehensif dalam upaya pemerintah Turki untuk menumpas terorisme dan menjaga stabilitas di wilayah yang telah dibebaskan dari pengaruh PKK.

Kemudian, unit statis tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan bagi warga sipil di wilayah yang mereka tempati, tetapi juga terlibat dalam operasi serangan

terhadap kelompok teroris. Namun, berbeda dengan unit penyerangan utama yang mengerahkan banyak pasukan secara langsung di satu titik, unit statis menggunakan taktik gerilya dalam operasinya. Taktik ini lebih sesuai karena memungkinkan mereka untuk mengejar dan membunuh atau menangkap sisa-sisa kelompok teroris yang mungkin selamat atau melarikan diri dari serangan unit utama yang lebih besar namun terpusat. Dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit, unit statis dapat bergerak secara fleksibel dan menjangkau area yang lebih luas untuk memastikan tidak ada keberadaan sisa-sisa ancaman di wilayah tersebut. Dan penyerangan dengan skala yang lebih kecil juga dapat mengurangi tingkat kematian yang dapat terjadi akibat pertempuran, TSK (*Türk Silahlı Kuvvetleri*) sebagai pasukan bersenjata nasional Turki, sangat sensitif dan berhati-hati dalam masalah tidak menyebabkan kerusakan sipil. Sensitivitas ini tidak hanya terbatas pada tidak menembak daerah yang dekat dengan target dimana warga sipil berada, tetapi juga dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah situasi seperti itu (Hurriyet 2015). TSK sangat berhati-hati dalam operasinya untuk menghindari kerusakan sipil, dengan menghindari penembakan di dekat area sipil dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah situasi yang membahayakan warga sipil.

Gambar 2. Pembersihan Ranjau dan Barikade PKK



Sumber: Anadolu Agency

Selain menyingkirkan sisa-sisa teroris yang melarikan diri, unit statis juga bertugas membersihkan wilayah yang sebelumnya dijadikan markas oleh PKK. Area-area ini biasanya dipenuhi dengan jebakan atau penghalang yang dipasang oleh PKK untuk menghambat pergerakan tentara Turki.

Unit statis juga melakukan penangkapan terhadap individu-individu yang diduga mendukung PKK, termasuk mereka yang terlibat dalam berbagai kelompok kombatan. Seperti yang dilakukan oleh Polisi Turki yang menangkap 297 orang dalam serbuan yang menargetkan para pendukung yang diduga dari beberapa kelompok militan (Yildiz 2015). Dengan ini pemerintah dapat melemahkan jaringan dukungan PKK dan mencegah aktivitas mereka yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Langkah ini bisa dikatakan sebagai strategi multifungsi, karena memiliki beberapa tujuan sekaligus. Pertama, serangan ini ditujukan untuk menghancurkan sisa-sisa anggota PKK yang tersebar di wilayah. Kedua, penangkapan terhadap para pendukung PKK, baik yang terlibat langsung maupun yang memberikan dukungan secara tidak langsung, hal ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak kelompok teroris tersebut. Ketiga, operasi ini juga bertujuan untuk melindungi warga sipil dari ancaman dan pengaruh PKK, memastikan bahwa masyarakat tetap aman dan tidak terjebak dalam konflik bersenjata.

3.3 Langkah Ketiga: Kontak dan Kendali Atas Populasi

Setelah penempatan unit statis di wilayah yang telah dikuasai, langkah COIN berikutnya adalah melakukan kontak dengan masyarakat sekitar dan membangun kendali atas mereka. Langkah ini memiliki tiga tujuan utama: pertama, membangun otoritas atas populasi; kedua, mengisolasi masyarakat agar tidak berhubungan dengan teroris; dan ketiga, menggali informasi lebih lanjut untuk persiapan langkah selanjutnya, yaitu langkah politik. Pada tahap ini, terjadi transisi dari operasi militer menuju operasi politik, karena di masa-masa inilah pemerintah menurunkan pasukan intelijen untuk mengumpulkan informasi di lapangan. Informasi ini digunakan untuk mencari hubungan antara kelompok teroris dengan aktor-aktor politik di dalam negara, sehingga pemerintah dapat merancang langkah-langkah strategis berikutnya yang lebih efektif dalam upaya kontra terorisme.

Pada langkah ini, biasanya dilakukan pemberlakuan jam malam di wilayah yang dikuasai dan menjaga akses keluar masuk ke dalam wilayah untuk membatasi

pergerakan teroris. Salah satu wilayah yang telah diterapkan jam malam adalah wilayah Cizre dan Diyarbakir. Pihak berwenang Turki telah memberlakukan kembali jam malam di kota Cizre, tenggara Turki, sehari setelah dicabut, dengan mengatakan bahwa mereka akan menggunakan jam malam tersebut untuk menangkap para tersangka pejuang Partai Pekerja Kurdistan (PKK) (Aljazeera 2015). Dengan terkendalinya aktivitas warga sipil, risiko korban jiwa di pihak sipil dapat diminimalisir saat militer dan PKK berkonfrontasi.

Penerapan jam malam oleh pemerintah Turki di wilayah tersebut akan memberikan beberapa keuntungan. Pertama, hal ini menunjukkan kepada masyarakat setempat bahwa otoritas pemerintah masih ada dan tidak tergantikan oleh PKK. Kedua, jam malam memperkuat kendali pemerintah atas wilayah tersebut. Gulala, dalam teorinya, menjelaskan bahwa pemberlakuan jam malam bertujuan untuk mengubah dinamika yang sering terjadi selama konflik, di mana siang hari dikuasai pemerintah dan malam hari dikuasai oleh kelompok teroris. Dengan jam malam, PKK akan kesulitan melakukan aktivitas mereka, sehingga memperkuat posisi pemerintah dalam konflik. Akan tetapi pembatasan ini juga dirasa cukup merugikan warga sipil setempat, karena mereka yang tetap tinggal di rumah mereka hidup di bawah jam malam yang ketat diberlakukan, yang meskipun dirancang untuk melindungi penduduk sipil, telah sangat membatasi kebebasan bergerak dan akses ke layanan, dengan memungkinkan pasukan keamanan menembaki siapa pun yang meninggalkan rumah mereka, dan membatasi pelayanan medis darurat mencapai lingkungan yang terkepung (Miller 2016). Pembatasan ini memang memiliki tujuan yang baik dan bisa memberikan hasil

yang efektif, namun tetap memiliki kekurangan yang dampaknya dirasakan oleh warga sipil setempat.

Selain melindungi warga sipil, militer dan pemerintah juga berupaya membangun kembali infrastruktur dan fasilitas di wilayah tersebut agar bisa ditempati kembali oleh masyarakat. Pemerintah meluncurkan rencana rekonstruksi yang bertujuan untuk membangun kembali lingkungan yang rusak dan memulihkan bangunan bersejarah. Dana yang dialokasikan untuk memulihkan masjid, gereja, dan bangunan bersejarah lainnya berjumlah 40 juta lira Turki (11 juta dolar AS) (Petkova 2017). Wilayah Cizre memang menjadi salah satu tempat pertempuran antara militer dengan PKK. Selain menjadi area konflik, Cizre juga dikenal dengan infrastrukturnya yang dipenuhi oleh bangunan-bangunan bersejarah yang bernilai tinggi bagi Turki.

Kontak dan kendali atas populasi tidak hanya dilakukan dengan cara menahan penduduk agar tidak keluar dari wilayahnya saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui evakuasi. Penduduk distrik bersejarah Sur di provinsi Kurdi Diyarbakir dipaksa untuk mengungsi dari rumah mereka karena wilayah yang dilanda kekerasan tersebut (Ekurd 2017). Diyarbakir telah menjadi medan pertempuran utama antara militer Turki dan PKK selama lebih dari tiga dekade, yang mengakibatkan kerusakan yang signifikan di wilayah tersebut. Pada awalnya, penduduk Diyarbakir tidak diperbolehkan keluar masuk wilayah tersebut, dan diberlakukan jam malam yang ketat. Namun, karena intensitas pertempuran yang semakin meningkat, pemerintah Turki memerintahkan penduduk Diyarbakir untuk meninggalkan kota tersebut. Langkah ini diambil agar militer dapat lebih fokus dalam melawan PKK tanpa takut mengenai warga sipil.

Meskipun mendapat berbagai penolakan dari penduduk setempat, pemerintah Turki berjanji untuk memperbaiki dan membangun kembali wilayah tersebut setelah pertempuran berakhir. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan pada bulan September lalu bahwa 1,9 miliar lira ($535,5 juta, 491 juta euro) akan diinvestasikan di distrik tersebut dengan miliaran lagi akan dituangkan ke wilayah tenggara untuk pembangunan setelah kekerasan (Ekurd 2017). Wilayah yang menjadi tempat pertempuran umumnya mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga langkah ini sangat penting. Dengan membangun kembali infrastruktur, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat untuk kembali ke kehidupan normal, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap pemulihan dan stabilitas jangka panjang. Upaya rekonstruksi ini juga berfungsi untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat, meningkatkan dukungan mereka terhadap pemerintah, dan mengurangi potensi perekrutan oleh kelompok teroris seperti PKK.

3.4 Langkah Keempat: Penghancuran Organisasi Politik Pemberontak

Setelah melalui serangkaian langkah yang sebagian besar berfokus pada aksi militer, langkah keempat mulai memasuki aspek politik. Menurut teori COIN, kelompok teroris atau pemberontak seringkali memiliki hubungan dengan individu atau organisasi politik di dalam pemerintahan. Situasi ini juga terjadi dalam konflik antara pemerintah Turki dan PKK. PKK kerap dikaitkan dengan Partai HDP, yang dikenal sebagai partai yang paling vokal dalam mendukung hak-hak Kurdi di Turki. Banyak pejabat tinggi dalam HDP diketahui memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin PKK.

Kata penghancuran dalam langkah ini bukan berarti menggunakan pendekatan militer untuk menyerang langsung organisasi politik yang terlibat. Melainkan dengan cara menangkap atau memberhentikan seorang individu yang memiliki jabatan di pemerintahan. Langkah ini digunakan Turki demi mengurangi dukungan-dukungan politik bagi PKK. Turki menggunakan beberapa cara dalam melakukan langkah ini, salah satunya adalah dengan menangkap dan mencabut individu-individu yang memiliki jabatan di wilayah yang mayoritas penduduknya adalah bangsa Kurdi. Turki telah mencopot 24 walikota yang dituduh memiliki hubungan dengan pejuang separatis Kurdi, menggantikan mereka dengan walikota yang ditunjuk oleh negara dalam perubahan besar di bawah kekuasaan darurat yang diberlakukan setelah upaya kudeta yang gagal (Aljazeera 2016). Tidak hanya berhenti di situ saja, Ankara juga berencana untuk mengambil tindakan hukum terhadap pemerintah daerah dan walikota dari Partai Demokratik Rakyat (HDP) yang berfokus pada masalah Kurdi, yang diduga telah mentransfer sumber daya negara ke PKK (Hurriyet 2016). Langkah politik yang dilakukan oleh Turki ini tentu menjadi pukulan keras bagi PKK, karena para pejabat yang dicabut jabatannya adalah individu-individu yang mendukung perjuangan bangsa Kurdi dan dianggap oleh pemerintah Turki sebagai pendukung teroris. Dengan mencabut jabatan para pejabat ini, pemerintah Turki berusaha memutus dukungan politik dan logistik yang mungkin diterima oleh PKK dari dalam negeri.

Turki tidak hanya mengambil langkah untuk mencabut dan menangkap para pejabat terkait, tetapi juga melanjutkan dengan menangkap beberapa anggota dan tokoh penting dari partai HDP yang dituduh memiliki keterkaitan dengan PKK. Salah

satunya adalah Selahattin Demirtas, Malam tanggal 3 November 2016, pihak berwenang Turki menangkap 11 anggota Partai Demokratik Rakyat (HDP), termasuk co-presiden Selahattin Demirtaş dan Figen Yüksekdağ. Semua yang ditangkap dituduh terlibat dalam terorisme karena diduga mendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK) (Sarsale 2016). Penangkapan ini menunjukkan bahwa Turki berusaha untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang dituduh memiliki hubungan dengan kelompok terlarang tersebut.

Penangkapan anggota-anggota HDP terus dilakukan oleh pemerintah Turki, dengan sebagian besar alasan penangkapannya adalah karena hubungan mereka dengan PKK. Bahkan, menurut data yang disiapkan oleh Komisi Hukum Partai Demokratik Rakyat (HDP), sebanyak 22.321 anggota HDP ditahan dari 24 Juni 2015 hingga 25 September 2020 (HDP 2020).

3.5 Langkah Kelima: Pemilu Lokal

Berdasarkan teori COIN Gulala, setelah pemimpin lokal yang memiliki hubungan atau mendukung kelompok teroris diberhentikan, pemilihan umum lokal dilakukan untuk memilih pengganti yang akan mengisi posisi pemimpin sementara. Proses ini melibatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil untuk membentuk pemerintahan lokal sementara. Dengan cara ini, para pemimpin yang terpilih akan berasal dari masyarakat itu sendiri, dan mereka akan memiliki kedekatan yang lebih besar dengan rakyat karena mereka merupakan hasil pilihan rakyat. Kemungkinan terpilihnya pihak netral atau bahkan pendukung pemberontak yang tidak

terdeteksi menjadi kecil karena masyarakat akan menyadari bahwa pemerintah mengetahui dukungan siapa yang mereka dukung.

Namun, Turki tidak mengadakan pemilihan umum lokal di wilayah-wilayah yang pemimpinnya telah diberhentikan. Sebaliknya, pemerintah Turki menunjuk langsung orang-orang kepercayaan untuk mengisi posisi pemimpin sementara di daerah tersebut. Terlihat dari laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Turki yang menyatakan bahwa pencabutan 94 walikota yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris separatis PKK dan penunjukan walikota sementara bukanlah preferensi dari Kementerian kami, melainkan kewajiban konstitusi dan tugas hukum untuk melindungi kesatuan negara yang tidak terpisahkan dengan wilayah dan rakyatnya, memastikan keselamatan hidup dan harta benda warga kami di wilayah tersebut, serta memenuhi kebutuhan bersama lokal warga kami (GENERAL DIRECTORATE OF PROVINCIAL ADMINISTRATION 2019).

Laporan ini menyoroti bagaimana walikota yang dicopot mengubah kota-kota ini menjadi pusat dukungan finansial dan logistik bagi organisasi teroris separatis, alih-alih menangani kebutuhan bersama lokal warga, dan bagaimana warga dirampas dari layanan dasar. Sebaliknya, laporan ini menunjukkan bagaimana walikota sementara yang ditunjuk mengalihkan fokus kota-kota tersebut ke fungsi inti mereka dan menyediakan layanan yang berhasil kepada masyarakat sesuai dengan hak dan hukum, dengan contoh-contoh konkret (Tutkal 2021).

Meski demikian, tujuan dari langkah ini berhasil tercapai, yaitu menggantikan pejabat yang mendukung PKK dan berpotensi mengganggu strategi kontraterorisme

Turki dengan pejabat yang dapat mendukung dan dipercaya oleh pemerintah dalam melaksanakan strategi tersebut.

3.6 Langkah Keenam: Menguji Pemimpin Lokal

Untuk langkah selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap para pejabat yang menggantikan pejabat sebelumnya. Setelah itu, dilakukan evaluasi untuk memastikan apakah pejabat-pejabat tersebut benar-benar memusuhi teroris dan mendukung pemerintah, atau sebaliknya.

Para pejabat yang telah ditunjuk oleh Turki, terbukti berpihak kepada pemerintah dan ikut membantu kontraterorisme Turki untuk semakin melemahkan PKK. Karena setelah pencabutan 94 walikota terpilih di wilayah tenggara dan timur dimulai pada Oktober 2016, pejabat yang ditunjuk pemerintah, baik gubernur provinsi atau gubernur distrik, mengambil alih fungsi-fungsi walikota. Meskipun dewan-dewan lokal tidak secara resmi dibubarkan, para pejabat tersebut tidak mengumpulkan dewan-dewan tersebut, sehingga secara efektif mencegah mereka berfungsi (Human Rights Watch 2020). Dewan lokal dibubarkan bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan karena terbukti bahwa mereka turut mendukung terorisme PKK.

3.7 Langkah Ketujuh: Membentuk Sebuah Partai

Keberhasilan tindakan Turki dalam mengganti para walikota yang mendukung PKK merupakan langkah politik yang signifikan. Langkah selanjutnya dalam teori ini adalah membentuk partai lokal di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok teroris. Tujuannya adalah untuk mendukung pejabat yang telah dipilih oleh pemerintah,

sehingga walikota yang ditunjuk dapat memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mendukung strategi kontraterorisme Turki. Tidak hanya itu saja, pembentukan partai politik baru dianggap dapat membantu pemerintah agar dapat memenangkan hati dan pikiran masyarakat

Namun, langkah ini tidak diterapkan oleh pemerintah Turki. Kemungkinan alasan utamanya adalah karena langkah ini dianggap terlalu rumit dan prosesnya terlalu panjang untuk diterapkan. Selain itu, alasan lainnya adalah karena keberadaan Partai AKP yang sudah sangat berkuasa di pemerintahan Turki. Sejak didirikan pada tahun 2001, AKP telah mendominasi panggung politik Turki. Dengan dukungan yang luas dari masyarakat, AKP memiliki legitimasi politik yang kuat untuk menerapkan kebijakan keamanan dan strategi kontra-terorisme. AKP, sebagai partai yang paling dominan dalam pemerintahan, telah berhasil mensentralisasi kebijakan keamanan dan kontra-terorisme di bawah satu atap. Dengan sentralisasi ini, pemerintah Turki dapat mengkoordinasikan berbagai lembaga keamanan, termasuk militer, kepolisian, dan badan intelijen, untuk bekerja secara sinergis (EfegiL 2008). Pembentukan partai politik baru dalam konteks COIN dimaksudkan untuk mengisi kekosongan politik dan memenangkan hati serta pikiran populasi yang mungkin merasa terpinggirkan. Namun, dengan kekuatan dan popularitas AKP, kebutuhan untuk partai politik baru menjadi kurang relevan. Dan juga, karena AKP telah berhasil mengatur kebijakan keamanan dan kontra-terorisme di dalam doniminasinya dalam parlemen Turki, memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dan respons cepat terhadap ancaman terorisme.

3.8 Langkah Kedelapan: Memenangkan atau Menekan Sisa-Sisa Pemberontak

Langkah terakhir ini merupakan gabungan dari semua langkah yang telah dilakukan oleh Turki sebelumnya, mengintegrasikan operasi militer dan politik. Dalam aspek militer, pasukan dan kepolisian yang telah berhasil melemahkan kekuatan PKK akan terus melakukan pencarian dan pengamanan terhadap anggota PKK yang masih bergerilya. Di sisi politik, penangkapan dan pemberhentian para politikus yang mendukung PKK bertujuan untuk memutus seluruh dukungan politik bagi PKK. Dengan terpilihnya walikota baru, diharapkan mereka dapat mengelola wilayah mereka dengan efektif untuk menghentikan perekrutan oleh PKK secara menyeluruh.

Kolaborasi instrumen militer dan politik Turki tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga meluas ke wilayah luar negeri. Para anggota PKK yang berhasil selamat dari serangan militer Turki seringkali melarikan diri ke Suriah dan Irak. Untuk menangani hal ini, pemerintah Turki berupaya melakukan diplomasi dengan negara-negara tersebut agar dapat membantu dalam pembasmian anggota PKK yang melarikan diri dan mengizinkan Turki untuk menurunkan pasukannya di wilayah mereka (Cevik 2022). Alih-alih mengejar militan PKK di dalam negeri, Turki telah berubah dari bersikap defensif menjadi ofensif dan kini bertujuan menciptakan kontrol wilayah di luar perbatasan selatannya untuk mencegah berkumpulnya pasukan PKK di dekat wilayahnya . Strategi menyeluruh ini diterapkan dengan berbagai cara di Suriah dan Irak. Di Suriah, Turki melakukan tiga operasi militer (pada tahun 2016, 2018, dan 2019) yang secara khusus bertujuan untuk mencegah terbentuknya wilayah

otonomi politik di sepanjang perbatasan Turki dengan tujuan untuk mengeringkan sumber pendanaan PKK di Suriah dan menunjukkan bahwa keberadaan kelompok bersenjata tersebut merugikan keamanan (Siccardi 2020).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam menganalisis strategi kontra-terorisme Turki terhadap PKK dengan menggunakan teori Counter-Insurgency (COIN), dapat disimpulkan bahwa pemerintah Turki telah menerapkan berbagai pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk menghadapi konflik yang terjadi. Teori COIN, yang dikembangkan oleh David Galula, menekankan bahwa pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam melawan pemberontakan, dengan penekanan pada delapan variabel kunci, yaitu penghancuran pasukan pemberontak, penerjunan unit statis, kontak dan kendali atas populasi, penghancuran organisasi politik pemberontak, pemilu lokal, menguji pemimpin lokal, membentuk partai baru, dan menekan sisa-sisa pemberontak. Berdasarkan teori ini, strategi kontra-terorisme Turki menunjukkan penerapan dan adaptasi terhadap variabel-variabel tersebut.

Pertama, dalam hal keberhasilan operasi militer, Turki telah menerapkan serangkaian operasi besar, seperti Operasi Martyr Yalcin, yang bertujuan untuk menekan kapasitas militer PKK dan mengamankan perbatasan. Operasi ini menunjukkan penerapan teori COIN dalam hal merespons secara langsung terhadap ancaman terorisme. Dengan penggunaan teknologi canggih, seperti drone dan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas militer, Turki mampu melaksanakan operasi yang lebih presisi dan efektif.

Kedua, dalam hal pengelolaan area yang dikuasai musuh, Turki telah berusaha untuk memperkuat kontrol dan pengawasan di daerah-daerah yang terkena dampak konflik. Penggunaan undang-undang anti-terorisme yang ketat dan reformasi hukum mendukung upaya ini dengan memberikan wewenang lebih besar kepada aparat keamanan.

Ketiga, dari segi pembentukan dan pemeliharaan dukungan populasi, pemerintah Turki telah berupaya keras untuk mengurangi dukungan terhadap PKK melalui serangkaian program pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah yang terkena dampak. Upaya ini mencakup investasi dalam infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, ada tantangan besar dalam hal bagaimana mengatasi ketidakpuasan dan marginalisasi yang sering menjadi sumber dukungan bagi kelompok teroris.

Keempat, dari perspektif struktur pemerintahan yang efektif, AKP sebagai partai penguasa telah mengintegrasikan berbagai lembaga keamanan dan intelijen untuk meningkatkan respons terhadap terorisme. Ini menunjukkan penerapan teori COIN dalam hal menciptakan struktur yang terkoordinasi dan responsif.

Kelima, dalam hal pendanaan musuh, Turki telah berupaya mengatasi aliran dana yang mendukung PKK melalui kerjasama internasional dan pengawasan ketat terhadap sumber pendanaan. Diplomasi regional dan internasional memainkan peran kunci dalam membatasi sumber daya PKK dan memperkuat strategi kontra-terorisme secara keseluruhan.

Terakhir, konsistensi strategi merupakan elemen penting dalam COIN, dan Turki telah berupaya menjaga konsistensi dalam kebijakan kontra-terorisme mereka. Namun, penyesuaian terus-menerus terhadap strategi diperlukan untuk menghadapi evolusi taktik PKK dan dinamika politik yang berubah. Secara keseluruhan, strategi kontra-terorisme Turki terhadap PKK menunjukkan penerapan teori COIN yang terintegrasi, meskipun masih ada tantangan dalam hal dukungan populasi, stabilitas jangka panjang, dan penegakan hukum yang adil. Pendekatan yang menyeluruh dan beradaptasi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dalam menghadapi ancaman terorisme.

4.2 Rekomendasi

Pemerintah Turki sebaiknya mengadopsi pendekatan strategis yang terintegrasi dalam menghadapi PKK dengan menggabungkan operasi militer, diplomasi, dan inisiatif pembangunan ekonomi. Pendekatan ini menawarkan manfaat signifikan dengan mengurangi ketergantungan pada kekuatan militer semata, dan lebih fokus pada penyelesaian masalah mendasar yang memicu terorisme, seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dengan mengimplementasikan program pembangunan ekonomi di daerah-daerah terdampak, pemerintah dapat mengurangi ketidakpuasan yang mendorong radikalisasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, diplomasi yang efektif memungkinkan Turki untuk membangun aliansi internasional dan mendapatkan dukungan global dalam memerangi terorisme, serta memperkuat kerjasama dalam berbagi intelijen dan melawan pendanaan terorisme. Program deradikalisasi dan reintegrasi juga penting untuk membantu mantan anggota PKK

kembali ke masyarakat secara produktif. Integrasi dari berbagai aspek ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan strategi kontra-terorisme, tetapi juga menciptakan solusi yang lebih holistik dan berjangka panjang, mengatasi akar penyebab konflik dan mengurangi kemungkinan kekerasan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Alarabiya. 2014. “PKK Leader: Kurds Should Mobilize against ISIS.” September 23, 2014. https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2014/09/23/PKK-leader-Kurds-should-mobilize-against-ISIS.

Aljazeera. 2015. “Turkey Reinstates Curfews after Deadly Clashes with PKK,” September 13, 2015.

———. 2016. “Turkey Removes 24 Mayors over ‘PKK Links,’” September 12, 2016.

Amnesty International. 2020. “TURKEY: WEAPONIZING COUNTERTERRORISM.”

Andika, Sheila Rosi. 2023. “ANALISA KEGAGALAN UPAYA PERDAMAIAN TURKI DENGAN PARTIYA KARKEREN KURDISTAN (PKK) TAHUN 2009-2015” 9:73–86.

ANF. 2022. “HDP: Dolmabahçe Agreement Is the Only Solution,” February 28, 2022.

Aydin, Aysegul, and Cem Emrence. 2015. *Zones of Rebellion: Kurdish Insurgents and the Turkish State*. Cornell University Press.

BBC. 2017. “Konflik Turki-PKK: 2.000 Tewas Sejak Gencatan Senjata Gagal - BBC News Indonesia.” October 3, 2017. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39230264.

Cevik, Salim. 2022. “Turkey’s Military Operations in Syria and Iraq.” Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). 2022. https://www.swp-berlin.org/publikation/turkeys-military-operations-in-syria-and-iraq.

CHP. n.d. “Cumhuriyet Halk Partisi Tarihi.” Accessed April 28, 2024. https://chp.org.tr/chp-tarihi.

ÇiÇek, Cuma, and Vahap Coşkun. 2016. “THE PEACE PROCESS FROM DOLMABAHÇE TO PRESENT-DAY:,” April.

Constanze, Letsch. 2013. “Kurds Dare to Hope as PKK Fighters’ Ceasefire with Turkey Takes Hold | Kurds | The Guardian.” May 7, 2013. https://www.theguardian.com/world/2013/may/07/kurds-pkk-turkey-peace-talks.

Daily Sabah. 2016. “Turkish Military Clears PKK Bases in Southeastern Hakkari, Kills 119 Terrorists - Daily Sabah.” April 20, 2016. https://web.archive.org/web/20160420000906/http://www.dailysabah.com/nation/2015/11/06/turkish-military-clears-pkk-bases-in-southeastern-hakkari-kills-119-terrorists.

Debora, Yantina. 2016. “Militan Kurdi Menyerang, Turki Berlakukan Jam Malam.” tirto.id. April 5, 2016. https://tirto.id/militan-kurdi-menyerang-turki-berlakukan-jam-malam-AFR.

Demirtas, Nurettin. 2013. “DTP Kongresi’nden ‘20-25 Özerk Bölge’ Önerisi.” October 31, 2013. https://bianet.org/haber/dtp-kongresi-nden-20-25-ozerk-bolge-onerisi-102605.

Dray, Malachi. 2015. “Understanding the Triumphs and Troubles of the Kurdish Resistance.” *Stanford Politics* (blog). October 4, 2015. https://stanfordpolitics.org/2015/10/04/understanding-triumphs-troubles-kurdish-resistance/.

Dri, Karwan Faidhi. 2020. “Silencing of the Kurdish Language in Modern Turkey: Who Is to Blame?” Rudaw.Net. July 22, 2020. https://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/210720201.

EfegiL, Ertan. 2008. “Turkey’s New Approaches toward the PKK, Iraqi Kurds and the Kurdish Question.” *Insight Turkey* 10 (3): 53–73.

Ekurd. 2017. “Kurds Forced to Leave Historic Turkey’s Sur District Hit by Violence.” *Kurd Net - Ekurd.Net Daily News* (blog). May 2, 2017. https://ekurd.net/kurds-forced-turkey-historic-2017-05-02.

GENERAL DIRECTORATE OF PROVINCIAL ADMINISTRATION. 2019. “The Trustee System in Municipalities and the Current Situation Report Has Been Published.” 03 2019. https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi/belediyelerdeki-kayyum-sistemi-ve-mevcut-durum-raporu-yayinlandi.

Global Security. 2016. “Turkey - Politics.” 2016. https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/tu-political-parties.htm.

Goksel, Nigar. 2015. “A New Cycle Begins in Turkey-PKK Conflict | Crisis Group.” August 11, 2015. https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/new-cycle-begins-turkey-pkk-conflict.

Gurcan, Metin. 2016. “ANKARA VS. THE PKK: OLD WAR, NEW STRATEGIES” 14:47–57.

HDP. 2020. “Over 22 Thousand HDP Members Arrested since 2015.” *HDP Europe* (blog). November 5, 2020. https://hdpeurope.eu/2020/11/over-22-thousand-hdp-members-arrested-since-2015/.

Human Rights Association. n.d. “ANTI TERROR LAW – HRA.” Accessed July 26, 2024. https://ihd.org.tr/en/anti-terror-law/.

Human Rights Watch. 2020. “Turkey: Kurdish Mayors’ Removal Violates Voters’ Rights | Human Rights Watch.” February 7, 2020. https://www.hrw.org/news/2020/02/07/turkey-kurdish-mayors-removal-violates-voters-rights.

Hurriyet. 2013. “Turkish government eyes PKK ceasefire as the first step for peace - Türkiye News.” Hürriyet Daily News. February 23, 2013. https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-government-eyes-pkk-ceasefire-as-the-first-step-for-peace-41735.

———. 2015a. “Erdoğan’s Denial of ‘Dolmabahçe Agreement’ Sparks Row - Türkiye News.” Hürriyet Daily News. July 20, 2015. https://www.hurriyetdailynews.com/erdogans-denial-of-dolmabahce-agreement-sparks-row-85656.

———. 2015b. “Turkish Military Sensitive about Civilian Casualties, Chief of General Staff Says - Türkiye News.” Hürriyet Daily News. October 30, 2015. https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-military-sensitive-about-civilian-casualties-chief-of-general-staff-says-90557.

———. 2016a. “Anti-PKK Operations over, Time for Reconstruction: Turkish PM - Türkiye News.” Hürriyet Daily News. June 22, 2016. https://www.hurriyetdailynews.com/anti-pkk-operations-over-time-for-reconstruction-turkish-pm--100726.

———. 2016b. “Erdoğan Says ‘Civil Society Groups Working against Turkish State’ Largely Destroyed - Türkiye News.” Hürriyet Daily News. June 23, 2016. https://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-says-civil-society-groups-working-against-turkish-state-largely-destroyed-100789.

Insight Turkey. 2010. “Turkey’s Radical Right and the Kurdish Issue: The MHP’s Reaction to the ‘Democratic Opening’, Articles Ödül Celep | Insight Turkey.” 2010. https://www.insightturkey.com/articles/turkeys-radical-right-and-the-kurdish-issue-the-mhps-reaction-to-the-democratic-opening.

ISDP. 2016. “Turkey’s Kurdish Conflict: 2015-Present.” Institute for Security and Development Policy. December 2016. https://www.isdp.eu/publication/turkeys-kurdish-conflict-2015-present/.

Khodr, Zeina. 2015. “Turkey’s War on ISIL Marks Major Policy Shift,” July 26, 2015. https://www.aljazeera.com/features/2015/7/26/turkeys-war-on-isil-marks-major-policy-shift.

Kirisci, Kemal, and Murat Somer. n.d. “What Does the Kurdish Opening in Turkey Entail? Comparative and Political Perspectives.” Middle East Institute. Accessed May 30, 2024. https://www.mei.edu/resources/transcript/what-does-kurdish-opening-turkey-entail-comparative-and-political-perspectives.

Kirmanj, Sherko. 2013. “Kurdistan Region: A Country Profile.” *Journal of International Studies (JIS)* 9:1–14.

Kocer, Zeynep, and Orhan Goztepe. 2017. “Representing Ethnicity in Cinema during Turkey’s Kurdish Initiative: A Critical Analysis of My Marlon and Brando (Karabey, 2008), The Storm (Öz, 2008) and Future Lasts Forever (Alper, 2011)” 13:54–68.

Mandiraci, Berkay. 2022. “Turkey’s PKK Conflict: A Regional Battleground in Flux | Crisis Group.” February 18, 2022. https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-regional-battleground-flux.

McCarus, Ernest N. 2009. “Kurdish.” In *The Iranian Languages*. Routledge.

Miller, Anna. 2016. “Trouble in Turkey,” January 15, 2016.

Ministry of Foreign Affairs. n.d. “PKK / Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs.” Accessed July 25, 2024. https://www.mfa.gov.tr/pkk.en.mfa.

Mustaqim, Andika Hendra. 2023. “5 Fakta Pemberontak PKK di Turki, Nomor 3 Memiliki Pasukan Berani Mati Bernama Immortals Battalion.” SINDOnews Internasional. October 3, 2023. https://international.sindonews.com/read/1216649/45/5-fakta-pemberontak-pkk-di-turki-nomor-3-memiliki-pasukan-berani-mati-bernama-immortals-battalion-1696335020.

Nykänen, Johanna. 2023. “Identity, Narrative and Frames: Assessing Turkey’s Kurdish Initiatives,” February.

Pannell, Ian. 2016. “Kurdish PKK Warns Turkey of Long Fight for Freedom.” *BBC News*, April 25, 2016, sec. Europe. https://www.bbc.com/news/world-europe-36081204.

“Partai Pekerja Kurdistan (PKK) – Rewards For Justice.” n.d. Accessed February 21, 2024. https://rewardsforjustice.net/id/rewards/partai-pekerja-kurdistan-pkk/.

Petkova, Mariya. 2017. “Displacement and Insecurity in Diyarbakir,” March 19, 2017.

Plakoudas, Spyridon. 2018. *Insurgency and Counter-Insurgency in Turkey: The New PKK*. Springer.

Pradnyana, I Putu Hadi, and Muhammad Syaroni Rofii. 2020. “Analysis of the End of the Kurdistan Partiya Karkerên Terrorist Organization in Turkey.” *Journal of Terrorism Studies* 2 (2). https://doi.org/10.7454/jts.v2i2.1026.

Primus, Josephus. 2013. “Konflik Turki vs Kurdi Sudah Cabut 40.000 Nyawa.” KOMPAS.com. January 29, 2013. https://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/29/15432830/~Internasional~News.

Pusane, Özlem Kayhan. 2015. “Turkey’s Military Victory over the PKK and Its Failure to End the PKK Insurgency.” *Middle Eastern Studies* 51 (5): 727–41. https://doi.org/10.1080/00263206.2014.979801.

Radpey, Loqman. 2022. “Kurdistan on the Sèvres Centenary: How a Distinct People Became the World’s Largest Stateless Nation.” *Nationalities Papers* 50 (6): 1187–1216. https://doi.org/10.1017/nps.2021.32.

Ray, Michael. n.d. “Casus Belli | International Relations | Britannica.” Accessed July 9, 2024. https://www.britannica.com/topic/casus-belli.

Rudaw. 2015. “Turkey: 119 PKK Killed, Anti-Aircraft Guns Seized in 40-Day Hakkari Sweep,” 11 2015.

———. 2023. “HDP, CHP Stress That Kurdish-Related Issues Should Be Solved in Parliament.” Rudaw.Net. March 20, 2023. https://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/20032023.

Sabah. 2015. “Efkan Ala: 3 Binin Üzerinde Terörist Öldürüldü.” Sabah. 2015. https://www.sabah.com.tr/gundem/2015/12/18/efkan-ala-3-binin-uzerinde-terorist-olduruldu.

Saeed, Yerevan. 2023. “Reflecting on the Centenary of the Treaty of Lausanne: The Kurdish Struggle and Unyielding Resilience | The Washington Institute.” July 17, 2023. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/reflecting-centenary-treaty-lausanne-kurdish-struggle-and-unyielding-resilience.

Sarsale, Stefano. 2016. “HDP Arrests Pose Grave Risks for Turkey’s Future | GRI.” Global Risk Insights. December 1, 2016. https://globalriskinsights.com/2016/12/hdp-arrests-risks-turkeys-future/.

Selin, Girit. 2015. “Turkey Kurds: Grim Reports from Cizre,” September 10, 2015.

Shirwan, Rojin. 2023. “Defeating the 10 Percent: The HDP’s Rise and Fall in the 2015 Turkish General Elections.”

Siccardi, Francesco. 2020. “Why Turkey’s Syria Policy May Be About to Change.” feruary 2020. https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2024/02/why-turkeys-syria-policy-may-be-about-to-change?lang=en.

Tepe, Sultan. 2005. “Turkey’s AKP: A Model ‘Muslim-Democratic’ Party?,” 69–82.

The New Arab. 2015. “Profile: The Peoples’ Democratic Party in Turkey (HDP).” Https://Www.Newarab.Com/. The New Arab. June 8, 2015. https://www.newarab.com/analysis/profile-peoples-democratic-party-turkey-hdp.

———. 2016. “Erdogan Says Time for Peace Talks with PKK Over.” Https://Www.Newarab.Com/. The New Arab. April 5, 2016. https://www.newarab.com/news/erdogan-says-time-peace-talks-pkk-over.

“Treaty of Sevres | Definition, Terms, Significance, & Facts | Britannica.” 2024. February 9, 2024. https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Sevres.

Tutkal, Serhat. 2021. “Trustees Instead of Elected Mayors: Authoritarian Neoliberalism and the Removal of Kurdish Mayors in Turkey.” *Nationalities Papers* 50 (6): 1164–86. https://doi.org/10.1017/nps.2021.42.

Ulutürk, Bülent. 2017. “An Assessment of Police Legitimacy and Public Cooperation on Counterterrorism in Turkey.”

Utami, Ranny. 2015. “Pelaku Bom Bunuh Diri Turki Beretnis Kurdi.” internasional. July 22, 2015. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150722173755-120-67645/pelaku-bom-bunuh-diri-turki-beretnis-kurdi.

VOA. 2016. “Penangkapan Pemimpin Parpol di Turki Picu Kritik Internasional.” VOA Indonesia. November 5, 2016. https://www.voaindonesia.com/a/penangkapan-politisi-di-turki-picu-kecaman-/3581741.html.

Weise, Zia, and Chris Stevenson. 2015. “Turkish Airstrikes against PKK in Iraq Throw Two-Year Ceasefire with Kurds into Jeopardy,” July 25, 2015. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkish-airstrikes-against-pkk-in-iraq-throw-twoyear-ceasefire-with-kurds-into-jeopardy-10416213.html.

Yesiltas, Murat. 2018. “How Turkey Has Changed Its Counter-Terrorism Policy Against the PKK.” *Politics Today* (blog). June 15, 2018. https://politicstoday.org/how-turkey-has-changed-its-counter-terrorism-policy-against-the-pkk/.

Yildiz, Guney. 2015. “Turkey Vows to Continue Campaign against Islamic State Militants,” July 25, 2015.